

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sejak proklamasi kemerdekaan hingga tahun 2014 Pemilihan umum di Indonesia telah diadakan sebanyak 11 kali yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014. Jumlah kontestan partai politik dalam pemilihan disetiap tahunnya tidak selalu sama, kecuali pada pemilu tahun 1977 sampai 1997.

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap Negara dan Pemerintah. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses pemilu untuk menentukan siapa yang harus menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu negara. Dengan adanya pemilu maka telah melaksanakan kedaulatan rakyat sebagai perwujudan hak asas politik rakyat, selain itu dengan adanya pemilu maka dapat melaksanakan pergantian pemerintahan secara aman, damai dan tertib, kemudian untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan pendapat Haryanto yang menyatakan bahwa: Pemilihan umum merupakan kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah dan dalam membuat keputusan itu para warga negara menentukan apakah yang sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki (Haryanto, 1984 : 81)

Indonesia merupakan Negara demokrasi, negara yang mengutamakan suara rakyat dalam mengambil keputusan, salah satu bentuk demokrasi Indonesia dapat dilihat dari sistem pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum (pemilu) pertama kali di Indonesia dilakukan pada tahun 1955 dengan jumlah sekitar 172

partai, dizaman penjajahan, Boedi Oetomo merupakan partai politik pertama di Indonesia yang kemudian disusul lahirnya partai-partai yang lain seperti Indische Partij, Masyumi, PNI dan lain sebagainya.

Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kesadaran politik, tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat, keberagaman ideologi, etnik dan suku, dan kondisi geografis. Pelaksanaan pemilu dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan baik dari jumlah partai politik maupun tata cara dalam pemilihan, oleh karena itu dibutuhkan suatu kerjasama yang baik antara rakyat dan pemerintahan yang mengatur jalannya pemilu.

Berlangsungnya pemilu yang demokratis harus menjamin pemilihan yang jujur, adil dan perlindungan bagi masyarakat yang memilih. Setiap masyarakat yang mengikuti pemilu harus terhindar dari rasa ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktek curang lainnya. Hal ini sesuai dengan isi Undang-undang Dasar 1945 Amandemen IV pasal 28G bahwa di dalam negara demokrasi “Setiap orang berhak atas perlindungan dari pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama yang melibatkan rakyat memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini merupakan suatu peristiwa penting dan bersejarah bagi Bangsa Indonesia, karena pada pemilu tahun 2004 suara rakyat yang menentukan siapa pemimpin negara Indonesia. Untuk pemilu tahun 2009 juga rakyat ikut terlibat langsung dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi terdapat perbedaan dari jumlah partai yang mengikuti pada tahun 2004 terdapat 34 partai sementara pada tahun 2009 terdapat 24 partai. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa “pemilihan umum perlu diselenggarakan secara lebih

berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

Untuk mewujudkan demokrasi yang seutuhnya, dimana pemilihan dilakukan secara langsung, maka pendidikan menjadi hal yang sangat mempengaruhi pemilihan langsung. Tingkat pendidikan formal yang memadai menyebabkan komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Sebaliknya semakin banyak masyarakat yang buta huruf maka informasi tentang pemilu tidak akan sampai sepenuhnya kepada masyarakat. Hal ini senada dengan pendapat Sukarna yang menyatakan bahwa, Dalam masyarakat yang warga negaranya sebagian besar buta huruf akan sukar untuk dijalankan pemilu secara bebas karena komunikasi dua arah tidak bisa dijalankan secara sempurna (Sukarna, 1981:23). Selanjutnya Mulyasa (2005) mengatakan “Pendidikan juga memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan wahana dalam menterjemahkan pesan-pesan konstitusi, serta sarana dalam membangun watak bangsa (*Nation Character Building*).

Selain dari segi geografis dan pendidikan, tata cara dalam pemilihan langsung selalu berbeda-beda yang tadinya dicoblos kemudian diganti menjadi dicontreng. Salah satu contoh dalam pemilu tahun 2009 jumlah partai yang harus dipilih oleh rakyat sebanyak 34 partai. Karena terlalu banyak jumlah partai yang tertera di surat pemilihan maka tidak mengherankan kalau surat pemilihan bentuknya begitu besar, hal ini akan mempersulit masyarakat dalam tata cara melipat kembali surat suara dengan baik. Dengan demikian maka akan menimbulkan rasa jenuh dalam diri masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Asep Kurnia yang mengatakan bahwa Pemilu 2009 ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya.

Realitas yang terjadi sekarang ini, para calon wakil rakyat hanya merakyat pada saat masa kampanye saja, mendekati rakyat untuk mengambil hati rakyat dan ketika datang waktunya pemilihan umum, mulailah tradisi yang sering disebut “serangan fajar” dipagi hari. Akan tetapi, dari permasalahan ini, kita tidak bisa selalu menyalahkan para calon wakil

rakyat yang menggunakan trik serangan fajar, seharusnya kita sebagai masyarakat harus berfikir lebih pintar bagaimana menyikapi dan berfikir lebih logis terhadap fenomena ini, seperti “ dari mana uang itu di dapat ? dan jika calon wakil rakyat itu menang, apakah ia akan menuntut timbal balik terhadap uang yang mereka berikan?

Tentu saja peran aktif Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tebing Tinggi dalam mensosialisasikan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pemilihan langsung.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengapa kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS (Voter turn-out) Partisipasi pemilih sejak pemilu 1999 sampai dengan pemilu 2014 bergerak fluktuatif. Pada pemilu legislatif, penurunan partisipasi pemilih sekitar 10% konsisten terjadi sampai pada pemilu 2009. Sementara itu pada pemilu 2014, angka partisipasinya naik sebesar 5%. Pada kasus pilpres, tercatat dalam pemilu 2014 pertama kalinya dalam sejarah angka partisipasinya lebih rendah dibandingkan pemilu legislatif. Pertanyaannya, kenapa angka partisipasi pemilu legislatif naik dibandingkan pemilu sebelumnya? Kenapa angka partisipasi Pilpres menyimpang dari pola pada pemilu-pemilu sebelumnya? Selain itu kenapa golput tetap saja hadir dalam setiap pemilu ? Apa penyebabnya?

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan apa saja yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah partisipasi pemilih pada pemilu legislatif 2014 dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Masalah yang muncul di setiap periode Pemilu dapat dicari dan ditemukan solusinya seperti : Tingkat kehadiran pemilih ke TPS, Suara tidak sah yang tinggi, adanya politik uang, Golput yang tetap saja hadir dalam setiap pemilu, kejenuhan masyarakat karena banyaknya pemilu yang diselenggarakan dari mulai pemilihan presiden dan wakil presiden, legislatif, gubernur dan Bupati/Walikota, tingkat kepercayaan masyarakat yang menurun

terhadap calon yang diusung, janji politik yang tidak terealisasi, kurangnya partisipasi masyarakat mengecek apakah sudah terdaftar di DPT atau belum, sampai langkanya sukarelawan politik dan kondisi melek politik di warga negara Indonesia yang berbeda-beda.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Dari sekian banyaknya permasalahan yang timbul dan keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian yang sangat kompleks tersebut, maka dalam hal ini peneliti hanya membatasi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pelaksanaan pemilihan Anggota Legislatif dan presiden dengan sistem pemilu 2014 sudah mencerminkan nilai-nilai demokrasi seutuhnya?
2. Berdasarkan apa memilih calon legislatif dan calon presiden yang disukai pada pemilu 2014 yang lalu?
3. Apakah pemilih pernah mengecek keberadaan nomor identitas pada DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilu 2014?
4. Apa alasan untuk menggunakan hak pilih saat pemilihan umum legislatif dan pemilu presiden 2014?
5. Bentuk kampanye mana yang paling menarik dan meyakinkan terhadap pasangan calon?
6. Informasi apa saja yang perlu diketahui terkait Pemilu 2014 ?
7. Bagaimana tingkat kepercayaan terhadap calon legislatif dan calon presiden dan wakil presiden yang dipilih ?
8. Mengapa pemilih Tidak menggunakan hak pilihnya ?

### **1.4. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah diatas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : mengapa pada pemilu legislatif

2014, angka partisipasinya naik sebesar 5% sedangkan pada pilpres 2014 angka partisipasinya lebih rendah dibandingkan pemilu legislatif?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa kehadiran dan ketidakhadiran Pemilih di TPS (*Voter turn-out*) Partisipasi pemilih sejak pemilu 1999 sampai dengan pemilu 2014 bergerak fluktuatif. Pada pemilu legislatif, penurunan partisipasi pemilih sekitar 10% konsisten terjadi sampai pada pemilu 2009. Sementara itu pada pemilu 2014, angka partisipasinya naik sebesar 5%. Pada kasus pilpres, tercatat dalam pemilu 2014 pertama kalinya dalam sejarah angka partisipasinya lebih rendah dibandingkan pemilu legislatif. Pertanyaannya, kenapa angka partisipasi pemilu legislatif naik dibandingkan pemilu sebelumnya? Kenapa angka partisipasi Pilpres menyimpang dari pola pada pemilu-pemilu sebelumnya?

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan mengapa kehadiran dan ketidakhadiran Pemilih di TPS (*Voter turn-out*) Partisipasi pemilih sejak pemilu 1999 sampai dengan pemilu 2014 bergerak fluktuatif.

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi sebagai sumbangan pemikiran dan bahan acuan bagi KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Panitia Kecamatan dan Kelurahan serta *Stake Holder* yang berkepentingan dengan pemilu dan peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji secara lebih mendalam tentang penurunan partisipasi pemilih.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu berikutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **1.1. Teori Demokrasi**

Pemilu merupakan salah satu bentuk demokrasi Negara Indonesia, pemilu adalah media demokrasi masyarakat untuk menyalurkan partisipasinya kepada Negara. Hampir semua negara demokrasi melakukan sistem pemilu untuk menunjukkan kedemokrasiannya, dalam negara yang demokratis, aktivitas memilih orang atau sekelompok orang untuk dijadikan seorang pemimpin dilakukan dengan sistem pemilu yang dilandasi dengan prinsip pemilu secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan isi UU No 10 tahun 2008 bab II pasal 2, agar semua warga negara dapat ikut berpartisipasi dan menyuarakan haknya. Akan tetapi, walaupun sudah ditetapkannya undang-undang tersebut, bukan berarti pemilihan umum di Indonesia terhindar dari perselisihan-perselisihan yang lainnya. Di Indonesia, peraturan mengenai pemilu terdapat dalam UUD 1945 hasil amandemen perubahan bab III, bab VIII mengenai pemilu pasal 22E.

Melihat isi undang-undang diatas bisa kita ketahui bahwa pemilu merupakan jalan utama dalam menentukan masa depan sebuah Negara demokratis, karena segala pemerintahan dimulai dengan memilih calon pemerintahnya terlebih dahulu, maka dalam memilih seorang pemimpin, dalam Negara demokratis yang menganut sistem pemilu, masyarakat harus memilihnya secara demokratis agar semua lapisan masyarakat dapat menyuarakan pendapatnya. Dalam hal ini ada beberapa pendapat pakar tentang demokrasi, diantaranya menurut *Plato* dalam teorinya menyatakan bahwa:

*Dalam bentuk demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat sehingga kepentingan umum (kepentingan rakyat) lebih diutamakan. Secara prinsipil, rakyat diberi kebebasan dan kemerdekaan. Akan tetapi kemudian rakyat kehilangan kendali, rakyat hanya ingin memerintah dirinya sendiri dan tidak mau lagi diatur sehingga mengakibatkan keadaan menjadi kacau, yang disebut Anarki.*

Dan juga menurut *Joseph A. Schmeter* berpendapat dalam teorinya bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan instutisional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

Itu berarti bahwa semua keputusan, rakyat yang menentukan, para wakil rakyat hanya sebagai tempat mencurahkan aspirasi rakyat dan kemudian memperjuangkannya di hadapan wakil-wakil rakyat yang lainnya, kemudian merundingkan dengan wakil rakyat yang lainnya dan mengambil persetujuan untuk disepakati dan ditaati bersama.

## 1.2. Kesadaran Politik Masyarakat

Dalam hal ini kita dapat mengetahui bahwa peran masyarakat sangat penting untuk menentukan masa depan Bangsa Indonesia. Rakyat harus memiliki kesadaran berpolitik untuk membantu jalannya kebijakan-kebijakan negara, rakyat harus sadar bahwa fenomena "serangan fajar" bukanlah sebuah rejeki dan bukan berarti bahwa calon pemimpin itu akan selalu mengayomi mereka seperti pada saat kampanye, rakyat harus diajarkan ilmu politik secara lebih logis, agar dalam pelaksanaannya masyarakat tidak bersifat apatis, minimal bersifat spektator bahkan lebih bagus jika masyarakat bersifat gladiator terhadap keadaan politik. Masyarakat harus memiliki rasa kepemilikan terhadap negara. pentingnya kesadaran berpolitik masyarakat untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin negara untuk masa depan negara Indonesia, menurut *Drs. M. Taophan*:

*Kesadaran politik adalah suatu proses batin yang menampakkan keinsyafan dari setiap warga negara akan urgensi urusan kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kesadaran politik atau keinsyafan bernegara menjadi penting dalam kehidupan kenegaraan, mengingat tugas-tugas negara bersifat menyeluruh dan kompleks. Karena itu tanpa dukungan positif dari seluruh warga masyarakat akan banyak tugas negara yang terbengkalai.*

Dari teori diatas dapat kita simpulkan bahwa sangat penting sekali memberikan pembelajaran politik terhadap masyarakat agar tumbuhnya kesadaran berpolitik, menciptakan masyarakat madani, masyarakat yang tidak bersifat apatis dalam berpolitik serta untuk masa depan Negara Indonesia itu sendiri.

## 1.3. Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)

Berdasarkan UUD 1945 Bab 1 Pasal 1 Ayat (2) kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam demokrasi modern yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil rakyat yang ditentukan sendiri oleh rakyat. Untuk menentukan siapakah yang berwenang mewakili rakyat maka dilaksanakan pemilihan umum. Pemilihan umum menurut Syarbaini (dikutip dalam Dani, 2010) adalah suatu cara



memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik.

#### **1.4. Tujuan Pemilu**

Paling tidak ada tiga tujuan pemilihan umum di Indonesia menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim (dikutip dalam Sukriono, 2009), yaitu *pertama* memungkinkan terjadinya pergantian pemerintah secara damai dan tertib, *kedua*: untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, dan *ketiga*; untuk melaksanakan hak-hak asasi warga negara. Sementara itu, Jimly Asshiddiqie (dikutip dalam Sukriono, 2009) merumuskan tujuan penyelenggaraan pemilu menjadi 4 (empat), yaitu :

- a. untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- b. untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- c . untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
- d. untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

#### **1.5. Macam-Macam Pemilu**

Pada pemilu yang dipilih tidak saja wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, tetapi juga para pemimpin pemerintahan yang duduk di kursi eksekutif. Di cabang kekuasaan legislatif, para wakil rakyat itu ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, ada yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah, dan ada pula yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten dan kota. Sedangkan di cabang kekuasaan pemerintahan eksekutif, para pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat adalah Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dengan adanya pemilihan umum yang teratur dan berkala, maka pergantian para pejabat dimaksud juga dapat terselenggara secara teratur dan berkala (Sukriono, 2009).

Peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Dani, 2010).

## 1.6. Stigma Golput

Hak dalam ilmu hukum adalah peranan seseorang yang mempunyai sifat fakultatif. Artinya boleh dilaksanakan boleh juga tidak dilaksanakan (lihat, Ensiklopedi Nasional Indonesia). Untuk melaksanakan hak ini maka kepada individu diberikan perlindungan agar setiap individu bebas untuk melaksanakan haknya atau tidak. Jika kita kaitkan dengan “hak memilih” maka itu berarti setiap individu bebas untuk memilih atau tidak memilih. Setiap individu bebas untuk memilih pilihannya apa yang dia dambakan dan bebas untuk tidak memilih satu pun pilihannya.

Berdasarkan fenomena kehadiran golput dan konsepsi dari hak, dapat dipahami bahwa golput adalah akibat bukan sebab, oleh karena itu jalan mudah untuk menekan angka golput bukan mendiskreditkannya. Apalagi menganggapnya sebagai sumber kekacauan, karena golput pada awal kehadirannya di negeri ini adalah sebuah gerakan moral. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai orang menjadi golput karena paksaan. Itu merupakan pelanggaran dan bisa dikategorikan sebagai usaha untuk menggagalkan pemilu. Menganjurkan golput atau mengkondisikan seseorang untuk menjadi golput juga sulit dibuktikan. Ketika reformasi bergulir rakyat makin mengetahui bahwa hak memilih dijamin oleh hukum. Ada harapan untuk terlibat dalam usaha pembangunan bangsa dengan cara memilih pemimpin-pemimpin yang propembaruan. Oleh karena itu, pemilu di era reformasi menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Termasuk di dalamnya sebagaian orang semakin antusias mengikuti pelaksanaan pemilu kepala daerah, walaupun dalam kenyataannya tingkat partisipasi pemilih belum memuaskan di Indonesia ini.

Walaupun secara teoritis memilih itu adalah Hak setiap warga negara, artinya boleh digunakan atau tidak, maka tentu sebagai seorang warga negara yang baik (*good citizenship*) yang tentu tahu akan hak dan kewajibannya dengan penuh kesadaran (*awareness*), maka keterlibatan dalam membangun budaya demokrasi dalam berpartisipasi politik juga merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindarkan oleh setiap warga negara.

Untuk itu, sebagai warga negara yang baik harus dengan penuh kesadaran menyadari bahwa menyalurkan aspirasi politik dengan cara memilih adalah peran serta dan partisipasi dalam membangun daerah dan bangsa. Karena aspirasi masyarakat dalam sebuah negara demokrasi sangat dihargai dan merupakan perwujudan suara Tuhan; “*vox populi vox dei*; suara rakyat adalah suara Tuhan!.

Kesadaran bahwa kita harus memilih dan menghindari golput ini harus dimaknai secara mendalam (*radix*), bahwa suara aspirasi kita walaupun satu suara tetapi sangat

berharga dalam menentukan pemimpin ke depan. Prinsip di atas inilah yang disebut dalam terminologi Pemilu dengan prinsip OPOVOV (*one person, one vote & one value*) yang merupakan hal yang penting yang harus dipahami masyarakat/rakyat sebagai pemegang mutlak kedaulatan, karena “SATU ORANG, SATU HAK PILIH DAN SATU NILAI”. Dengan prinsip ini pemimpin yang nanti akan terpilih paling tidak akan memperoleh dukungan dan legitimasi yang kuat dan legitimasi penuh dari rakyat yang nantinya mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan.

Dengan demikian, manakala rakyat/masyarakat sudah menyadari betapa pentingnya suara yang mereka punya mengandung hakikat nilai yang tidak bisa dibeli atau ditukar dengan apapun, seperti cita-cita, harapan kesejahteraan, keamanan dan kemakmuran, maka hendaknya masyarakat tidak menyalurkan hak pilihnya secara emosional atau asal pilih, terlebih melakukan golput.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Tebing Tinggi. Pengambilan lokasi penelitian ini adalah untuk mengetahui kehadiran dan ketidakhadiran Pemilih di TPS (Voter turn-out). Partisipasi pemilih sejak pemilu 1999 sampai dengan pemilu 2014 bergerak fluktuatif. Pada pemilu legislatif, penurunan partisipasi pemilih sekitar 10% konsisten terjadi sampai pada pemilu 2009. Sementara itu pada pemilu 2014, angka partisipasinya naik sebesar 5%. Pada kasus pilpres, tercatat dalam pemilu 2014 pertama kalinya dalam sejarah angka partisipasinya lebih rendah dibandingkan pemilu legislatif. Pertanyaannya, kenapa angka partisipasi pemilu legislatif naik dibandingkan pemilu sebelumnya? Kenapa angka partisipasi Pilpres menyimpang dari pola pada pemilu-pemilu sebelumnya? Selain itu kenapa golput tetap saja hadir dalam setiap pemilu ? Apa penyebabnya?

Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan terhitung dari bulan Juni Sampai dengan bulan Juli 2015

#### **3.2. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kota Tebing Tinggi yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu Legislatif 2014 dan Pemilu Presiden 2014 yang terdiri dari 5 kecamatan dengan 35 Kelurahan dan 407 TPS dan jumlah pemilih untuk pemilu Legislatif seluruhnya 126.324 pemilih dan Pemilu Presiden seluruhnya 124.529 pemilih.

Tabel 3.1  
Jumlah Populasi Penelitian di Kota Tebing Tinggi

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah TPS		JUMLAH DPT	
			LEGISLATIF	PILPRES	LEGISLATIF	PILPRES
1	Bajenis	7	86	86	26285	26155
2	Padang Hilir	7	79	79	25579	25355
3	Padang Hulu	7	76	76	25493	24857
4	Rambutan	7	85	85	25907	25614
5	Tebing Tinggi Kota	7	81	81	23060	22548
	Jumlah	35	407	407	126324	124529

Sedangkan untuk menentukan besarnya sampel, seperti yang dikatakan Suharsimi Arikunto. Apabila subyeknya kurang dari 100, maka sebaiknya diambil semuanya sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subyek besar, maka dapat diambil 5 %, 10% -15% atau 20% -25% atau lebih. Jumlah DPT masyarakat di Kota Tebing Tinggi untuk pemilu Legislatif adalah 126.324 orang dan Pemilu Presiden berjumlah 124.529 orang. Berdasarkan pernyataan diatas jumlah populasi lebih dari 100, maka peneliti mengadakan penelitian dengan sampel yang diambil 5% dari jumlah populasi dengan menggunakan rumus Slovin (Notoadmojo, 2002) :

Dimana:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

1 = Konstanta

e = Pengambilan sampel yang dapat ditolerir

Untuk sampel Pemilu Legislatif

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

$$n = \frac{126324}{1 + 126324 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{126324}{11264,24}$$

$$= 99,9$$

$$= 100 \text{ orang (Penggenapan)}$$

Untuk sampel pada Pemilu Presiden

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

$$n = \frac{124529}{1 + 124529 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{124529}{1246.29}$$

$$= 9.99$$

$$= 100 \text{ orang (Penggenapan)}$$

Dari hasil perhitungan untuk menentukan sampel penelitian, diperoleh hasil baik untuk pemilu Legislatif 2014 maupun Pemilu Presiden 2014 sebanyak 100 sampel yang tersebar di semua kelurahan yang ada di Kota Tebing Tinggi sebanyak 35 Kelurahan.

Dengan menggunakan rumus Slovin diatas maka didapatkan jumlah sampel 100 orang. Mengingat jumlah sampel yang terlalu kecil maka peneliti berdasarkan pertimbangan-pertimbangan menetapkan sampel menjadi 278 orang. Dalam pengambilan sampel ini, peneliti menggunakan teknik Random Sampling, yaitu cara pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota populasi tersebut". Adapun untuk menentukan jumlah sampel setiap Kecamatan peneliti menggunakan Rumus Prosentase.

$$N = \frac{f}{n} \times 100 \%$$

Keterangan:

N = Sampel  
 f = Jumlah populasi setiap Kecamatan  
 n = Jumlah populasi keseluruhan

Maka dengan menggunakan rumus Prosentase didapatkan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3.2  
 Jumlah Sampel Penelitian Setiap Kecamatan di Kota Tebing Tinggi

No	Kecamatan	DPT		F — x 100 % N	Jumlah Sampel
		Legislatif	Presiden		
1	Bajenis	26285	26155	21	58
2	Padang Hilir	25579	25355	20	56
3	Padang Hulu	25493	24857	20	56
4	Rambutan	25907	25614	21	57
5	Tebing Tinggi Kota	23060	22548	18	51
	Jumlah	126324	124529	100	278

Berdasarkan table 3.2 diatas dapat diketahui jumlah sampel di Kota Tebing Tinggi yang keseluruhannya berjumlah 278 orang. Untuk melihat keterwakilan masyarakat dalam penyebaran angket terhadap masyarakat di Kota Tebing Tinggi maka peneliti mengambil tempat sampel di semua kecamatan dan sebagian Kelurahan yang ada di Kota Tebing Tinggi, setting tempat sampel sesuai dengan maksud peneliti yaitu perilaku pemilih masyarakat di Kota Tebing Tinggi. Selanjutnya mengingat Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang besar, maka peneliti mengambil sampel Tempat Pemungutan Suara (TPS) seperti Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3  
 Jumlah TPS Yang Menjadi Sampel Penelitian di Kota Tebing Tinggi

No	Kecamatan	JUMLAH TPS	TPS Sampel	Jumlah Sampel
1	Bajenis	86	21	58
2	Padang Hilir	79	19	56
3	Padang Hulu	76	19	56
4	Rambutan	85	21	57
5	Tebing Tinggi Kota	81	20	51

	Jumlah	407	100	278
--	--------	-----	-----	-----

### **3.3. Metodologi Penelitian**

#### **1. Metode pengumpulan data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dan wawancara, metode survei adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrument untuk meminta tanggapan dari responden tentang sampel sedangkan metode wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden, komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik muka responden dapat menjadi pelengkap ekspresi responden.

#### **2. Metode Analisis Data**

Dalam mengkaji data pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu suatu pendekatan dalam melakukan penelitian mengenai fenomena pemilu ini yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahhan serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun di lapangan, meneliti secara langsung mengenai budaya pemilu yang berlaku di masyarakat Kota Tebing Tinggi, dengan tujuan menggambarkan suatu gejala sosial.

Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena pemilu yang tengah berlangsung di Kota Tebing Tinggi pada saat studi, dimana yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah. dan untuk menganalisis fenomena ini, penyusun menggunakan metode historis dan metode studi kasus



1. metode historis adalah metode yang mengkaji masyarakat pada masa silam dan masyarakat sekarang ini (perbandingan), pada metode ini akan dianalisis mengenai orientasi para calon wakil rakyat dan masyarakat sekarang ini yang berorientasi atas kekuasaan dan kepentingan pribadi sehingga mengabaikan rasa nasionalisme, berbeda sekali dengan orientasi para wakil rakyat dan masyarakat pada masa orde lama.
2. metode studi kasus adalah metode yang mengkaji sedalam dalamnya fenomena atau gejala-gejala nyata yang terjadi dalam masyarakat, objeknya adalah kelompok-kelompok masyarakat, kelompok lembaga maupun individu.

### **3. Validitas Internal**

- a. Pengontrolan pengaruh sejarah untuk mencegah pengaruh-pengaruh kejadian khusus.
- b. Pengaruh kejenuhan perlu diperhatikan dengan mengusahakan pelaksanaan perlakuan relative tidak lama.
- c. Pengaruh kontaminasi antar sampel penelitian perlu diperhatikan dengan tidak menginformasikan penelitian
- d. Pengaruh pemahaman sampel penelitian terhadap informasi pemilu tidak mempengaruhi sampel penelitian yang kurang memahami informasi pemilu.

### **4. Validitas Eksternal**

- a. Pengambilan sampel penelitian berdasarkan pengacakan populasi (cluster random sampling)
- b. Menciptakan suasana yang sama dengan keadaan sehari-hari dan memberikan tindakan yang sama bagi semua sampel penelitian.
- c. Kontaminasi dan bias penelitian, dikontrol dengan cara tidak mempengaruhi perilaku subjek dan mengusahakan antar satu sampel dengan sampel lainnya tidak terjadi bias.

- d. Tim survey lapangan dipertahankan tetap sama sejak awal hingga akhir penelitian tanpa ada upaya-upaya untuk merekayasa kemungkinan hasil penelitian.

### 3.4. Prosedur Penelitian

Prosedur dalam penelitian ini dilakukan dilakukan dalam dua tahap, yaitu sebelum diadakan penelitian dan pada saat dilakukan penelitian.

1. Prosedur penelitian sebelum dilakukan penelitian, yaitu :
  - a. Menentukan lokasi penelitian
  - b. Menentukan permasalahan pokok yang akan diteliti
  - c. Menyusun angket yang akan disebarakan ke sampel penelitian.
  - d. Menentukan sampel penelitian
  
2. Prosedur pada saat dilakukan penelitian
  - a. Melakukan survey lapangan dengan menyebarkan angket ke sampel yang telah ditentukan.
  - b. Perlakuan sampel diupayakan sama dengan cara menjelaskan tujuan penelitian dan menjawab jika ada pertanyaan dari sampel penelitian.
  - c. Melakukan evaluasi hasil angket setelah perlakuan.

### 3.5. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah angket untuk mengukur prilaku memilih. Untuk setiap jawaban akan dianalisis sehingga akan diketahui apakah prilaku memilih berdasarkan rasionalitas atau tidak rasional.

Tabel 3.4. Instrumen Penelitian Pemilu Legislatif

No	Indikator	Nomor Butir Soal
1.	Nilai Demokrasi	1
2.	Alasan penggunaan hak pilih pada Pileg	4

3.	Pertimbangan dalam memilih Caleg	8
4.	Pemahaman Dalam Mencoblos	2
5.	Mengecek Keberadaan di DPT	3
6.	Kepercayaan kepada Caleg	9
7.	Bentuk kampanye	5
8.	Sumber Informasi Pemilu Legislatif	7
9.	Menerima hasil Pemilu 2014	6
10.	Partisipasi dalam Pileg 2014	10

Tabel 3.4. Instrumen Penelitian Pemilu Presiden

No	Indikator	Nomor Butir Soal
1.	Alasan penggunaan hak pilih pada Pilpres	2
2.	Pertimbangan dalam memilih Presiden	7
3.	Alasan Memilih Calon Presiden	1
4.	Calon yang memberikan imbalan	3
5.	Kepercayaan kepada Calon Presiden	8
6.	Kepercayaan kemampuan Calon Presiden	9
7.	Bentuk Kampanye	4
8.	Informasi Pemilihan Presiden	5
9.	Sumber Informasi Pemilihan Presiden	6
10.	Partisipasi dalam Pilpres 2014	10

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Deskripsi Data Hasil Penelitian**

Untuk untuk mengkaji mengapa kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS (Voter turn-out) Partisipasi pemilih sejak pemilu 1999 sampai dengan pemilu 2014 bergerak fluktuatif. Pada pemilu legislatif, penurunan partisipasi pemilih sekitar 10% konsisten terjadi sampai pada pemilu 2009. Sementara itu pada pemilu 2014, angka partisipasinya naik sebesar 5%. Pada kasus pilpres, tercatat dalam pemilu 2014 pertama kalinya dalam sejarah angka partisipasinya lebih rendah dibandingkan pemilu legislatif. Pertanyaannya, kenapa angka partisipasi pemilu legislatif naik dibandingkan pemilu sebelumnya? Kenapa angka partisipasi Pilpres menyimpang dari pola pada pemilu-pemilu sebelumnya? Selain itu kenapa golput tetap saja hadir dalam setiap pemilu ? Apa penyebabnya?

Hasil pengukuran melalui angket yang disebarakan ke masyarakat yang dijadikan sampel dalam penelitian ini menunjukkan data yang sangat variatif. Bentuk angket yang disebarakan ke masyarakat dibagi menjadi 2 bagian yaitu data responden dan Karakteristik Pertanyaan.

Data responden ditujukan untuk melihat penyebaran masyarakat yang ada di Kota Tebing Tinggi. Sedangkan karakteristik pertanyaan ditujukan untuk melihat bagaimana perubahan partisipasi pemilih dalam hal kehadiran dan ketidakhadiran di TPS pada pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Kota Tebing Tinggi.

##### **4.1.1. Penggunaan Hak suara**

Kota Tebing Tinggi terdiri atas 5 kecamatan yaitu Kecamatan Bajenis, Kecamatan Padang Hilir, Kecamatan Padang Hulu, Kecamatan Rambutan dan Kecamatan Tebing Tinggi Kota. Untuk pemilihan umum Legislatif 2014, terdiri atas 3 Daerah Pemilihan (Dapil) Yaitu Dapil 1 (Padang Hilir), Dapil 2 (Kecamatan Padang Hulu dan Kecamatan

Tebing Tinggi Kota) dan Dapil 3 (Kecamatan Rambutan dan Kecamatan Bajenis) seperti yang tertera pada Tabel 4.1. berikut.

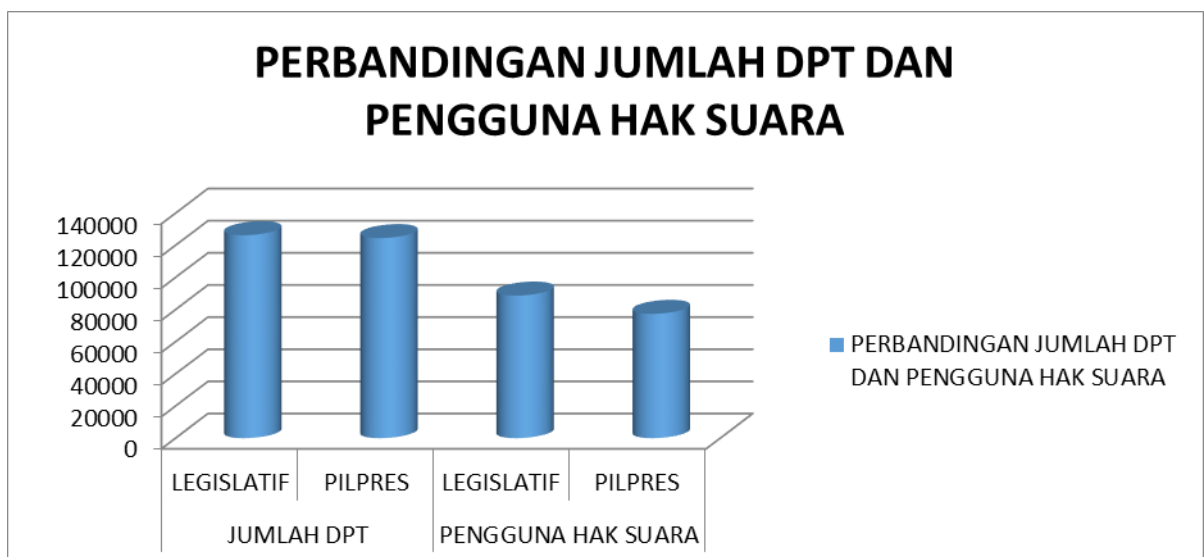
Masing Masing Kecamatan terdiri atas 7 Kelurahan, sehingga total jumlah kelurahan yang ada di Kota Tebing Tinggi 35 Kelurahan. Jika dilihat Daftar Pemilih Tetap (DPT) baik pada pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden Tahun 2014 hampir sama. Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Legislatif 2014 sebanyak 126.324 pemilih, Sedangkan pada pemilu Presiden sebanyak 124.529 pemilih.

Jika ditinjau dari pengguna hak pilih, maka akan terlihat terjadi penurunan yang sangat signifikan pada pemilu presiden jika dibandingkan dengan pemilu Legislatif tahun 2014. Dari table tersebut terlihat yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislative 2014 sebanyak 88.749 pemilih, sedangkan pada pemilu Presiden sebanyak 77.376 pemilih. Terjadinya perbedaan ini tentunya banyak faktor yang menyebabkannya.

Tabel 4.1  
Jumlah Populasi Penelitian di Kota Tebing Tinggi

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah DPT		YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	
			LEGISLATIF	PILPRES	LEGISLATIF	PILPRES
1	Bajenis	7	26285	26155	19566	16889
2	Padang Hilir	7	25579	25355	18987	16150
3	Padang Hulu	7	25493	24857	16963	14480
4	Rambutan	7	25907	25614	18822	16589
5	Tebing Tinggi Kota	7	23060	22548	14411	13268
	<b>Jumlah</b>	<b>35</b>	<b>126324</b>	<b>124529</b>	<b>88749</b>	<b>77376</b>

Grafik 4.1. Perbandingan Jumlah DPT dan Pengguna Hak Suara



Dari Grafik 4.1. di atas terlihat Jumlah Daftar Pemilih Tetap antara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden hampir sama. Tetapi Jika dibandingkan dengan Pengguna Hak suara baik pada pemilu Legislatif maupun pemilu Presiden terlihat terjadinya penurunan yang sangat nyata. Dari Daftar Pemilih Tetap Pemilu Legislatif berjumlah 126.324 pemilih yang menggunakan hak pilihnya 88.749 pemilih (70,26 %). Sedangkan pada pemilu Presiden dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 124.529 pemilih, yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 77.376 pemilih (62,13%). Terjadinya penurunan yang sangat nyata ini menjadi suatu alasan mengapa dilakukan suatu survey kepada pemilih khususnya di Kota Tebing Tinggi untuk mendapatkan suatu jawaban mengapa hal ini bias terjadi.

#### **4.1. 2. Suara Sah Dan Tidak Sah**

Dari Tabel 4.2 dibawah dapat lihat dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, jumlah suara sah dan tidak sah sangat bervariasi. Pada pemilu Legislatif 2014 yang terdiri dari DPD, DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota jumlah suara sah dan tidak sah sangat bervariasi. Terlihat bahwa jumlah suara tidak sah yang terbesar adalah pada Pemilihan DPD. Sedangkan pada pemilu Presiden jumlah suara tidak sah sangat kecil sekali. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua pemilih yang ada di Kota Tebing Tinggi yang menggunakan hak pilihnya sudah paham tentang mekanisme pemilihan presiden. Hal ini menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat yang sudah cukup baik dan juga sosialisasi yang cukup gencar yang dilakukan oleh KPU Kota Tebing Tinggi cukup berhasil.

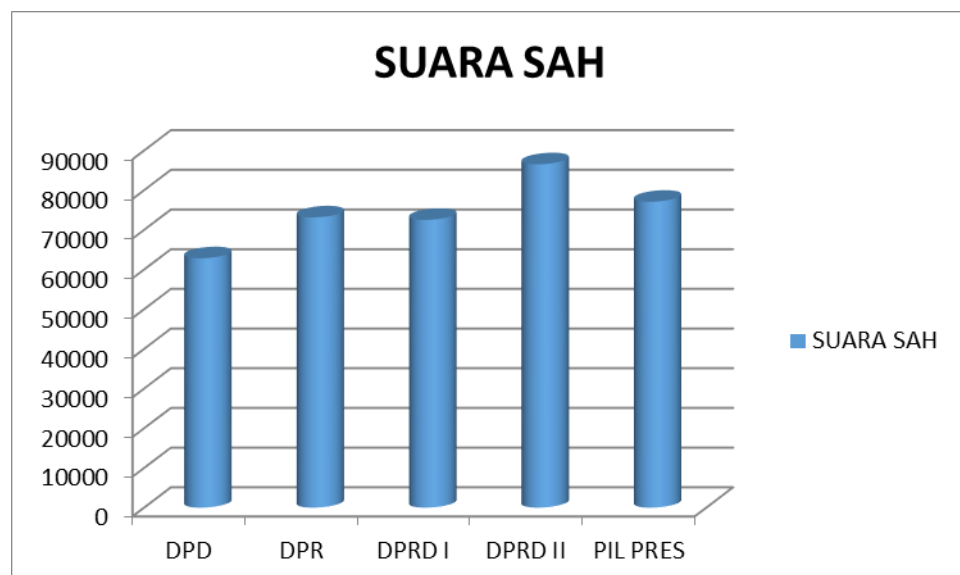
Tabel 4.2

Jumlah Yang Menggunakan Hak Pilih dan Suara Sah dan Tidak Sah di Kota Tebing Tinggi

No	Kecamatan	YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH		SUARA SAH DAN TIDAK SAH				
		LEGISLATIF	PILPRES	LEGISLATIF				PILPRES
				DPD	DPR	DPRD I	DPRD II	
1	Bajenis	19566	16889	13718 5848	16027 3539	15859 3707	19071 495	16825 64
2	Padang Hilir	18987	16150	13485 5502	15754 3233	15743 3244	18562 425	16092 58
3	Padang Hulu	16963	14480	11610 5353	13668 3295	13381 3582	16553 425	14438 42
4	Rambutan	18822	16589	13490 5332	15439 3383	15611 3211	18296 526	16536 53
5	Tebing Tinggi Kota	14411	13268	10549 3862	12263 2148	11919 2492	14051 401	13199 69
	Jumlah	88749	77376	62852 25897	73151 15598	72513 16236	86533 2272	77090 286

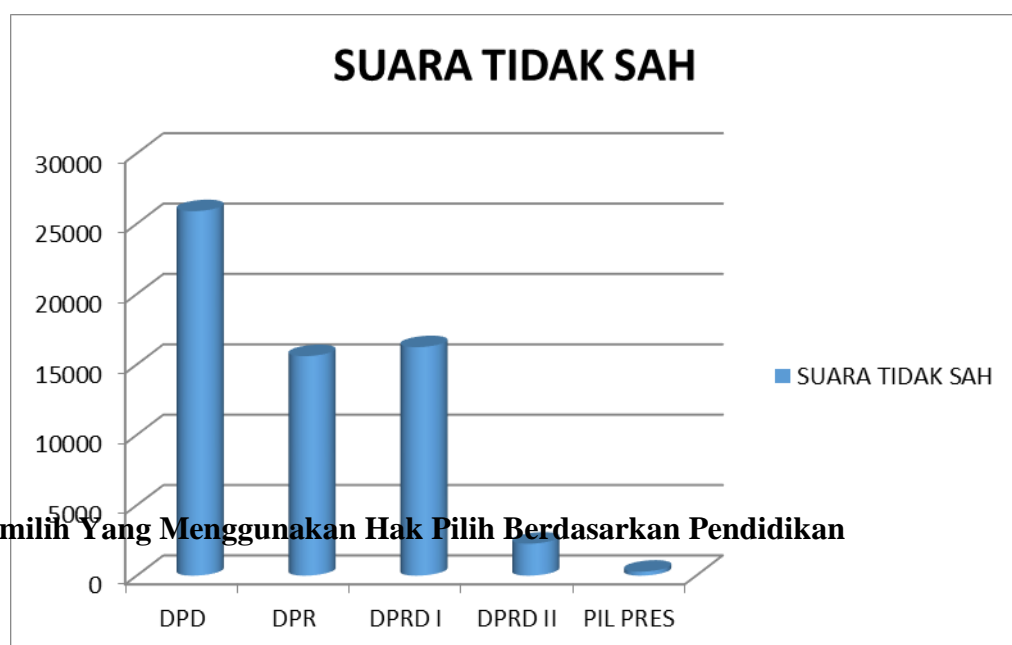
Selanjutnya jika dilihat dari Grafik 4.2. berikut terlihat bahwa suara sah untuk masing masing pemilihan berbeda. Pada pemilu Legislatif suara sah tertinggi pada pemilihan DPRD Kabupaten Kota (97,5%), DPRD Propinsi (81,71%), DPR (82,42%) dan DPD (70,82%). Hal ini menunjukkan bahwa pemilih sangat antusias dalam memilih calon anggota Legislatif di daerah Kabupaten/kota. Hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya pada pemilihan calon Anggota Legislatif Kabupaten Kota langsung berhubungan dengan masyarakat di kota Tebing Tinggi dan calon yang dipilih juga adalah warga Kota Tebing Tinggi. Selain itu faktor hubungan kekeluargaan dan kekerabatan serta persahabatan juga sangat mempengaruhi. Sehingga kesungguhan pemilih yang menggunakan hak pilihnya untuk menjadikan suaranya sah menjadi sangat besar. Jika dilihat pada pemilu DPR tingkat Propinsi, Pusat dan DPD, Suara sah cenderung menjadi kecil. Hal ini disebabkan pemilih mulai merasakan jarak yang semakin jauh sehingga menimbulkan suatu pemikiran calon yang terpilih akan semakin kecil perhatiannya pada kota Tebing Tinggi. Sedangkan pada pemilu Presiden suara sah 99,63%.

Grafik 4.2. Suara sah Pada Pemilu Legislatif 2014 dan Pemilu Presiden 2014



Selanjutnya jika dilihat dari Grafik 4.3. berikut terlihat bahwa suara tidak sah untuk masing masing pemilihan berbeda. Pada pemilu Legislatif suara tidak sah terendah pada pemilihan DPRD Kabupaten Kota (2,5%), DPRD Propinsi (18,29%), DPR (17,58%) dan DPD (29,18%). Hal ini menunjukkan kecenderungan semakin jauh jarak yang akan dipilih, semakin kurang antusias masyarakat untuk memilih. Sedangkan pada pemilu presiden suara tidak sah sangat rendah sekali hanya 0,37%.

Grafik 4.3. Suara Tidak Sah Pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014.



#### 4.1.3. Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih Berdasarkan Pendidikan



Pendidikan tentunya sangat mempengaruhi masyarakat dalam membentuk pola berfikir masyarakat. Selain pendidikan, adat istiadat dan budaya setempat juga memegang peranan yang sangat dominan dalam membentuk pola berfikir di masyarakat.

Grafik 4.3. Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih Berdasarkan Pendidikan

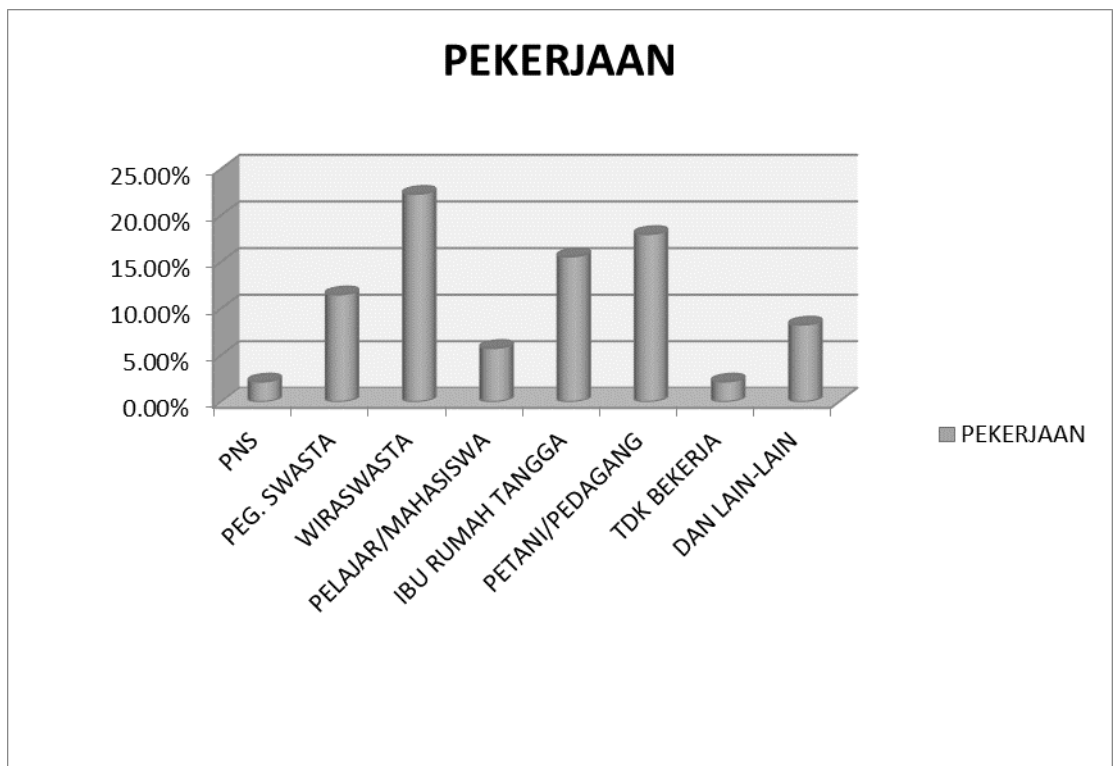


Dari Grafik 4.3. diatas pemilih di dominasi tamatan Sekolah Menengah Umum 40.29%, Sarjana 19.06%, Sekolah Menengah Pertama 15.47%, Diploma 13.67%, Sekolah Dasar 11.51%. Hal ini menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat sudah sangat memadai sehingga pola berfikirnya juga sudah sangat baik.

#### 4.1.4. Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih Berdasarkan Pekerjaan

Jika ditinjau dari pekerjaan, menunjukkan pekerjaan masyarakat sangat beragam didominasi oleh wiraswasta 22.30% dan petani/pedagang 17.99%.

Grafik 4.4. Data Responden Berdasarkan Pekerjaan



## 4.2. Kesenjangan Pemilih antara Pemilu Legislatif dan Presiden

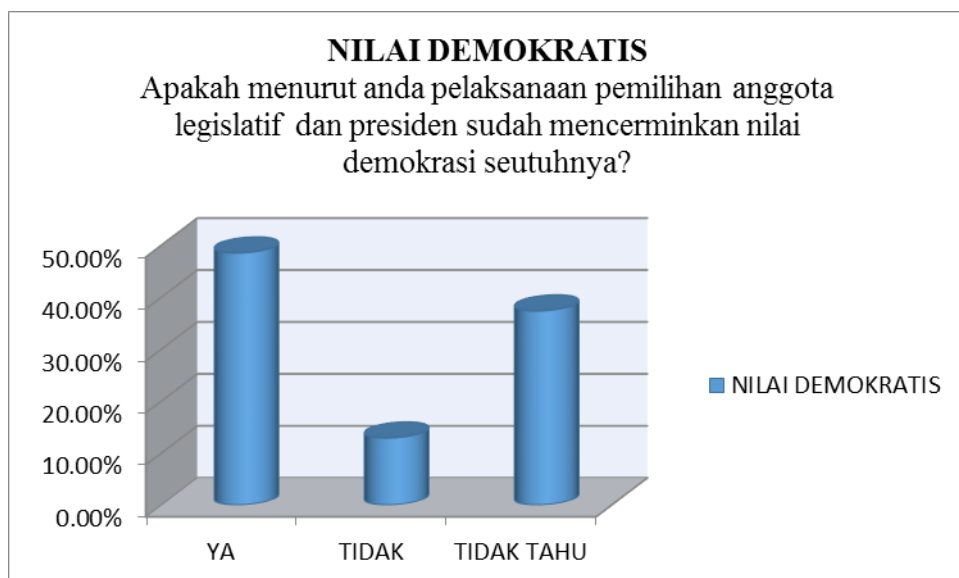
Untuk melihat kenapa terjadi kesenjangan jumlah pemilih antara pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014 yang tidak lazim dimana selama ini jumlah pemilih pada pemilu presiden selalu lebih besar dari pemilu legislatif. Tapi untuk tahun 2014 ini pola itu tidak sesuai dimana jumlah pemilih pada pemilu presiden lebih kecil dibandingkan pemilu legislatif di Kota Tebing Tinggi pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 dapat dilihat dari beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dijabarkan dalam bentuk pertanyaan yang diberikan kepada masyarakat yang terpilih menjadi sampel penelitian. Dari pertanyaan itu dianalisis mengapa pola yang biasa terjadi bisa berubah pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 dan pemilu Presiden 2014.

### 4.2.1. Nilai Demokrasi Pemilu Legislatif

Nilai demokrasi merupakan pertanyaan global yang dibuat untuk pemilu legislatif maupun pemilu presiden 2014. Pertanyaan ini adalah pertanyaan umum untuk melihat pelaksanaan pemilu apakah pelaksanaan secara demokratis atau tidak.

Dari hasil analisis data yang diperoleh dari kuisisioner yang dijawab oleh masyarakat dapat dilihat dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 dan pemilu presiden 2014 di Kota Tebing Tinggi (Grafik 4.2.1.).

Grafikl 4.2.1. Nilai Demokrasi Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014



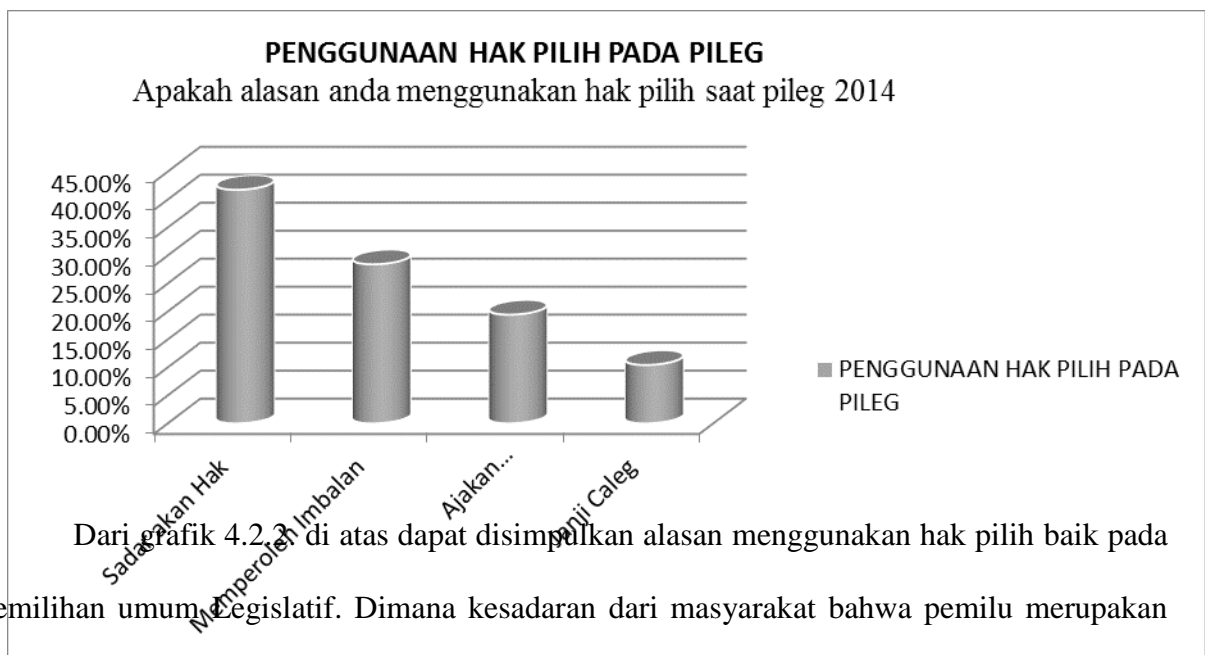
Dari Grafik 4.2.1. di atas terlihat bahwa pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden 2014 di Kota Tebing Tinggi telah mencerminkan nilai demokrasi yang diharapkan sebanyak 48.56% jawaban dari responden. Sedangkan yang mengatakan pelaksanaan tidak demokrasi sebanyak 12.95% responden, 37.41% responden menjawab tidak tahu. Dengan kata lain bahwa pelaksanaan pemilihan umum Legislatif dan presiden 2014 di Kota Tebing Tinggi masih perlu mendapat perhatian dari penyelenggara pemilu baik di tingkat KPPS, PPS, PPK dan KPU Kota Tebing Tinggi.

#### 4.2.2. Alasan Menggunakan Hak Pilih

Alasan menggunakan hak pilih dijadikan suatu parameter dalam penelitian dan dibuat secara terpisah baik pada pemilu legislative maupun pada pemilu presiden 2014 dengan tujuan untuk melihat apakah ada perbedaan alasan pemilih menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislative dan pada pemilu presiden 2014.

Dari hasil analisis data yang diperoleh untuk alasan menggunakan hak pilih, dapat dilihat dari kuisioner yang dijawab oleh masyarakat pada pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Tebing Tinggi pada grafik 4.2.2 berikut.

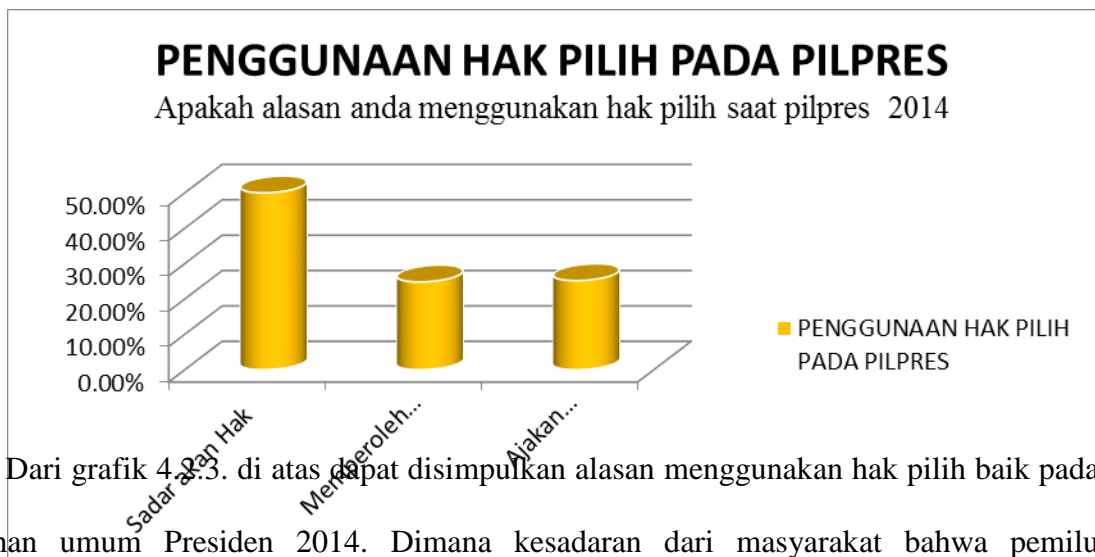
Grafik 4.2.2. Alasan Masyarakat Menggunakan Hak Pilih Pada Pileg 2014



Dari grafik 4.2.2 di atas dapat disimpulkan alasan menggunakan hak pilih baik pada pemilihan umum Legislatif. Dimana kesadaran dari masyarakat bahwa pemilu merupakan hak dari warga masyarakat pada pileg 41,73%. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat

yang sudah sangat baik mengenai hak dan kewajiban dari masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Pada Pileg ajakan dari keluarga 28.42%. Dalam hal ini masyarakat cukup antusias. Pada Pileg memperoleh imbalan 19.42%, hal ini diprediksi menjadi salah satu penyebab kenapa pada pileg 2014 terjadi kenaikan jumlah yang menggunakan hak pilihnya. Masyarakat lebih percaya, karena yang akan dipilih adalah anggota dewan yang lebih sering dijumpai dan adanya wacana bahwa anggota dewan yang ingin dipilih harus memberikan imbalan kepada pemilih.

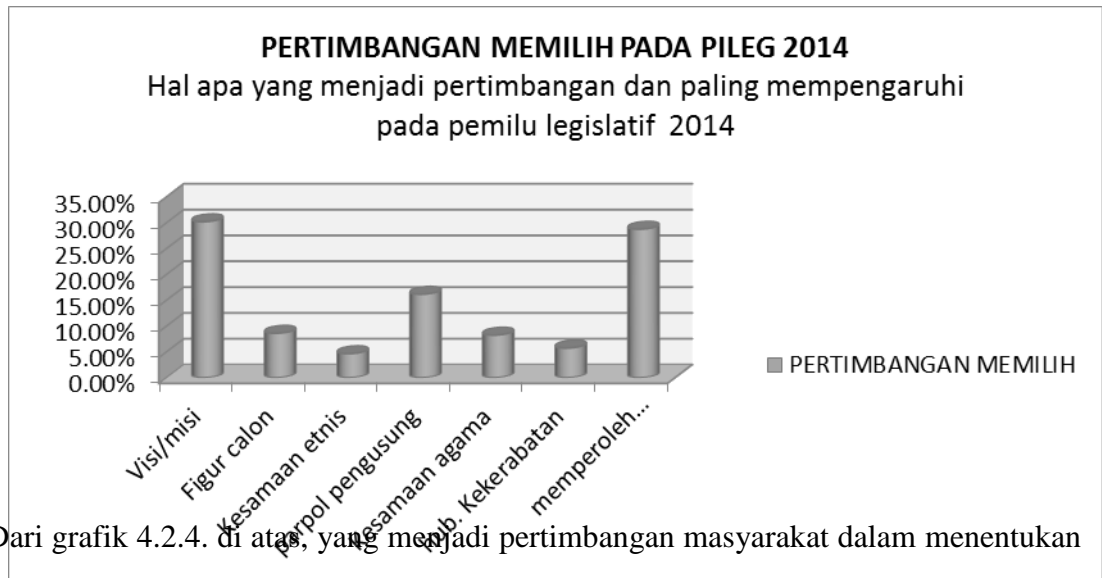
Grafik 4.2.3. Alasan Masyarakat Menggunakan Hak Pilih Pada Pilpres 2014



Dari grafik 4.2.3. di atas dapat disimpulkan alasan menggunakan hak pilih baik pada pemilihan umum Presiden 2014. Dimana kesadaran dari masyarakat bahwa pemilu merupakan hak dari warga masyarakat pada pilpres 50 %. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat yang sudah sangat baik mengenai hak dan kewajiban dari masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Pada Pilpres ajakan dari keluarga 24.82%, pada item memperoleh imbalan 25.18 %. Hal ini diprediksi menjadi salah satu penyebab kenapa pada pilpres 2014 terjadi penurunan jumlah yang menggunakan hak pilihnya. Pada pilpres, harapan masyarakat untuk mendapatkan imbalan peluangnya lebih kecil karena calon yang akan dipilih tidak pernah dijumpai. Yang sering dijumpai hanyalah tim sukses saja.

Selanjutnya pada grafik 4.2.4. berikut terlihat yang menjadi pertimbangan dalam memilih calon anggota legislative.

Grafik 4.2.4. Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Memilih Calon Anggota Legislatif



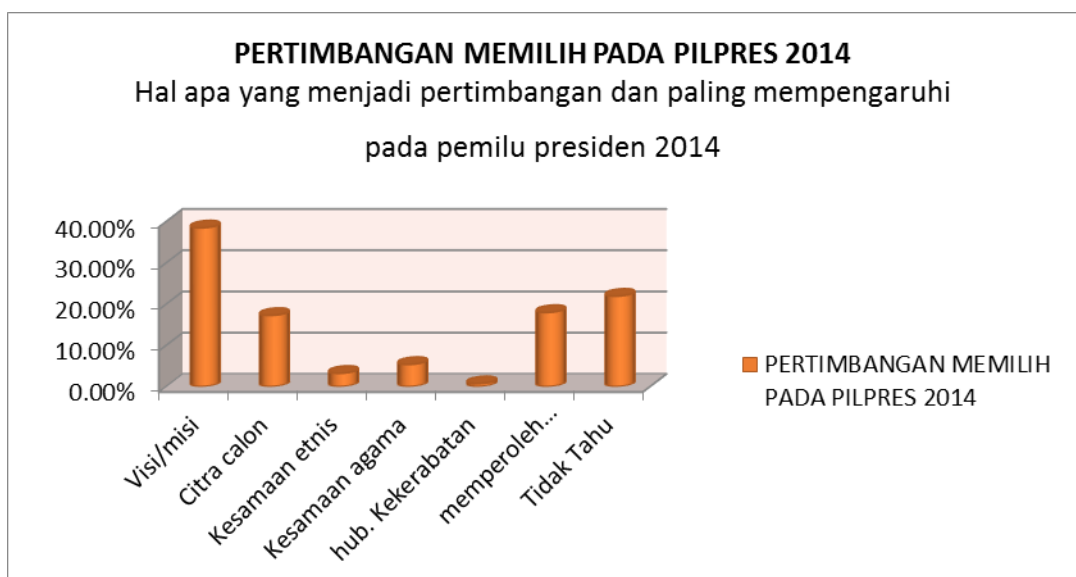
Dari grafik 4.2.4. di atas, yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam menentukan

pilihannya dalam memilih calon anggota legislative adalah karena visi dan misi dari caleg tersebut 30.22%, memperoleh imbalan 28.78 % dan parpol pengusung 16.19 %. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih mengutamakan visi dan misi dari caleg yang akan dipilih. Tetapi memperoleh imbalan juga masih menjadi orientasi masyarakat dalam memilih. Sehingga dapat disimpulkan bahwa calon yang akan dipilih oleh masyarakat adalah yang bisa memberikan visi dan misi sekaligus memberikan imbalan bagi pemilih. Selain itu peranan partai pengusung juga memiliki peran besar mempengaruhi masyarakat menjatuhkan pilihannya. Selain figure dari calon itu sendiri memberikan kontribusi dalam hal masyarakat menjatuhkan pilihannya sebesar 8.63%.

Hal ini menunjukkan masyarakat Kota Tebing Tinggi benar benar menaruh harapan yang sangat besar kepada anggota DPRD Terpilih untuk bias menyuarakan aspirasi masyarakat dengan melihat visi dan misi dari caleg tersebut. Selanjutnya kesamaan agama 8.27% dan hubungan kekerabatan 5.76% serta kesamaan etnis 4.68 %.

Jika dibandingkan dengan pemilu Presiden dapat dilihat pada grafik 4.2.4 berikut.

Grafik 4.2.5. Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Memilih Calon Anggota Legislatif



Dari grafik 4.2.5. di atas, yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya dalam memilih adalah karena visi dan misi dari calon presiden tersebut 38.49%, sedang yang menjawab tidak tahu 21.94%, memperoleh imbalan 17.99 % dan citra calon 17.27 %. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih mengutamakan visi dan misi dari calon presiden yang akan dipilih. Tetapi memperoleh imbalan juga masih menjadi orientasi masyarakat dalam memilih. Sehingga dapat disimpulkan bahwa calon yang akan dipilih oleh masyarakat adalah yang bisa memberikan visi dan misi sekaligus memberikan imbalan bagi pemilih.

Hal ini menunjukkan masyarakat Kota Tebing Tinggi benar benar menaruh harapan yang sangat besar kepada calon presiden Terpilih untuk bisa menyuarakan aspirasi masyarakat dengan melihat visi dan misi dari calon tersebut. Selanjutnya kesamaan agama 5.39% dan hubungan kekerabatan 0.72%.

#### 4.2.3. Alasan memilih Calon Presiden

Alasan masyarakat memilih calon presiden pada pemilu presiden 2014 dapat dilihat pada grafik 4.2.6 di bawah ini.

Grafik 4.2.6. Alasan memilih Calon Presiden Pada Pelaksanaan Pemilu Presiden 2014



Dari Grafik 4.2.6. di atas terlihat bahwa pelaksanaan Pemilu Presiden 2014 di Kota Tebing Tinggi, alasan masyarakat memilih sangat bervariasi. Ketokohan dari calon masih menjadi pilihan masyarakat dengan responden sebanyak 34.17% pemilih. Selanjutnya disusul dengan program dari calon tersebut sebanyak 19.06% pemilih. Ketidak tahuan masyarakat dalam memilih 18.71%. Partai pengusung 13.31%. Hasil/preyasi 7.91%, kepribadian dari calon 7.19% dan pilihan orang tua 0.72%.

Dari data diatas pilihan masyarakat terhadap calon presiden adalah karena ketokohan atau figurnya. Selanjutnya program yang ditawarkan calon presiden juga menjadi alasan masyarakat memilih calon tersebut dan juga partai pengusungnya.

#### 4.2.4. Pemberian Hadiah/imbalan

Terjadinya degradasi mental dalam menanggapi segala sesuatu menyebabkan terjadinya penurunan pola berfikir positif dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan berkembangnya wacana dimasyarakat bahwa setiap perhelatan pemilu identik dengan bagi-bagi hadiah maupun uang. Sehingga kesan money politik sangat kentara saat ada hajatan pemilu.

Dari data kuesioner yang disebarkan ke masyarakat mengenai pemberian hadiah menunjukkan hasil seperti pada Grafik 4.2.7 berikut.

Grafik 4.2.7. Pendapat masyarakat Tentang Calon Yang memberikan Hadiah



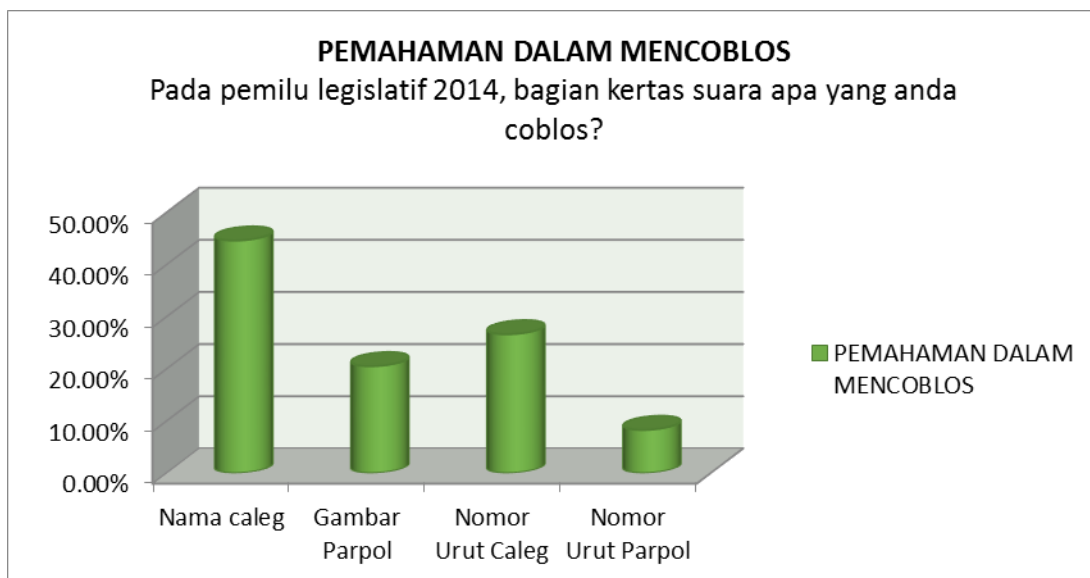
Dari grafik 4.2.7 di atas dapat disimpulkan bahwa terjadinya degradasi mental dari masyarakat sangat kentara. Hal ini dapat dilihat bahwa 36.65% masyarakat mengatakan pemberian hadiah kepada pemilih adalah hal yang biasa saja, 36.33% menyatakan setuju. Hanya 15.83% yang menyatakan kurang setuju dan 15.83% yang menyatakan tidak setuju.

Hal ini diduga menjadi salah satu sebab mengapa pada pemilihan presiden terjadi penurunan jumlah pemilih karena pada pemilihan presiden, uang yang beredar sangat sedikit. Hal ini disebabkan pada pemilihan presiden calon yang akan dipilih tidak berjumpa langsung dengan warga kota tebing tinggi hanya melalui tim sukses saja. Berbeda dengan pemilu legislative, dimana calon yang akan dipilih langsung bisa berjumpa dengan masyarakat dan juga masyarakat lebih percaya kepada caleg yang akan dipilih akan memberikan hadiah kepada pemilih.

#### 4.2.5. Pemahaman Dalam Pelaksanaan Pemilu

Pemahaman dalam penyelenggaraan pemilu menjadi suatu tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan itu sendiri. Pemahaman ini juga dapat menjadi suatu indikator sebenarnya yang menjadi pilihan utama masyarakat itu apakah individu caleg itu sendiri atau partai pendukungnya. Hal ini dapat dilihat pada Grafik 4.2.8 berikut.

Grafik 4.2.8. Pemahaman Masyarakat dalam Mencoblos



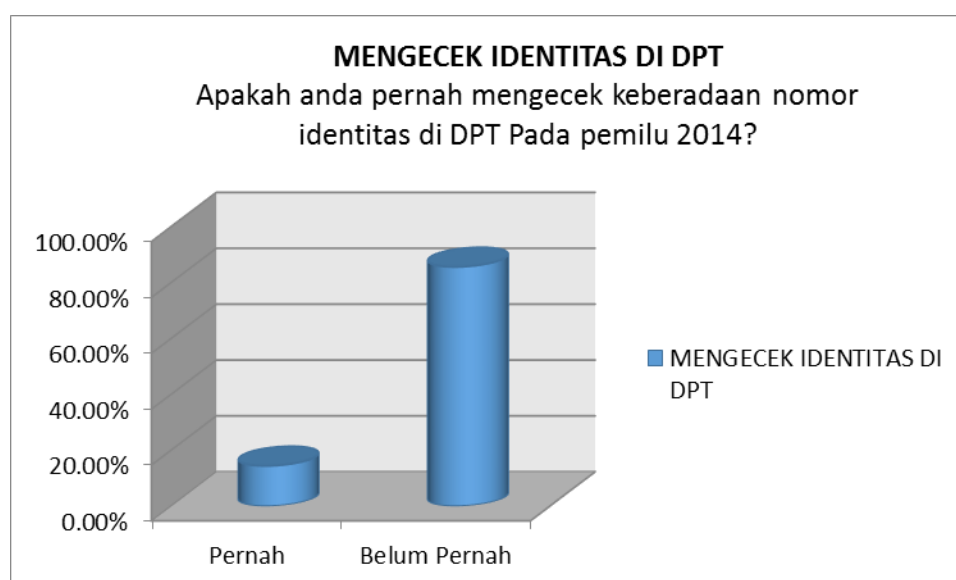


Dari grafik 4.2.8 di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat cenderung memilih nama caleg atau nomor urut caleg. Hal ini terlihat 44.60% masyarakat mencoblos nama caleg dan 26.62% memilih nomor caleg yang diinginkan masyarakat. Hanya 20.50% pemilih yang memilih gambar Partai dan 8.27% yang mencoblos nomor partai. Hal ini menunjukkan bahwa caleg yang akan mengikuti pemilihan benar-benar berusaha meyakinkan pemilih bahwa mereka layak untuk dipilih. Sebaliknya hal ini menjadi pekerjaan rumah buat partai politik pengikut pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih cenderung memilih orang daripada memilih partai. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan partai mulai ditinggalkan masyarakat. Oleh sebab itu mesin partai harus bekerja dengan ekstra keras untuk kembali meyakinkan masyarakat bahwa baik partai maupun calegnya sama-sama mampu menyalurkan aspirasi masyarakat.

#### 4.2.6. Nomor Identitas Pemilih Di DPT

Salah satu permasalahan mengapa ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu adalah karena kurang aktifnya masyarakat melihat daftar Pemilih yang telah di sebar di tempat tempat yang ramai dikunjungi orang.

Grafik 4.2.9. Grafik Melihat Keberadaan Nomor Identitas di DPT



Dari grafik 4.2.9 berikut dapat di lihat bahwa sebanyak 85.61% masyarakat belum atau tidak melihat Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditempelkan oleh penyelenggara pemilu dan hanya 14.39% yang melihat. Dari hasil tersebut dapat dikatakan kesadaran masyarakat untuk mengecek identitasnya di Daftar Pemilih tetap pemilu sangat rendah sekali, hal ini menjadi catatan penting buat penyelenggara pemilu di Kota Tebing Tinggi baik PPS, PPK maupun KPU Kabupaten dan juga masyarakat untuk terus saling mengingatkan tentang pentingnya DPT, sehingga kalau belum terdaftar di DPT dapat dengan segera didaftarkan. Karena salah satu syarat untuk bisa menggunakan hak pilih adalah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Hal ini diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kenapa pada pemilu presiden cenderung lebih menurun jika dibandingkan dengan pemilu legislative. Pada pemilu presiden masyarakat cenderung kurang antusias, hal ini diduga karena calon yang akan dipilih tidak pernah dijumpai oleh masyarakat, yang dijumpai masyarakat hanya tim sukses. Selain itu juga diduga adanya imbalan menjadi salah factor yang menyebabkan masyarakat kurang antusias. Sebaliknya pada pemilu legislative, walaupun masyarakat tidak melihat identitasnya di DPT, tapi informasi langsung dari caleg lebih sering diterima masyarakat. Dan fenomena di lapangan cenderung wacana masyarakat bahwa pemilihan caleg lebih menjanjikan dalam memberikan imbalan. Sehingga masyarakat lebih antusias dalam menggunakan hak pilihnya.

#### **4.2.7. Kepercayaan Kepada Calon Anggota Legislatif dan Presiden**

Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada para caleg yang akan bertarung dan akan menjadi wakil rakyat di Kota Tebing Tinggi harusnya dipegang teguh dan harus dilaksanakan. Masyarakat menaruh harapan yang sangat besar kepada wakilnya di dewan untuk dapat menyalurkan aspirasinya dan untuk membangun Kota Tebing Tinggi menjadi lebih baik dan lebih maju lagi. Hal ini dapat dilihat pada grafik 4.2.10 berikut.

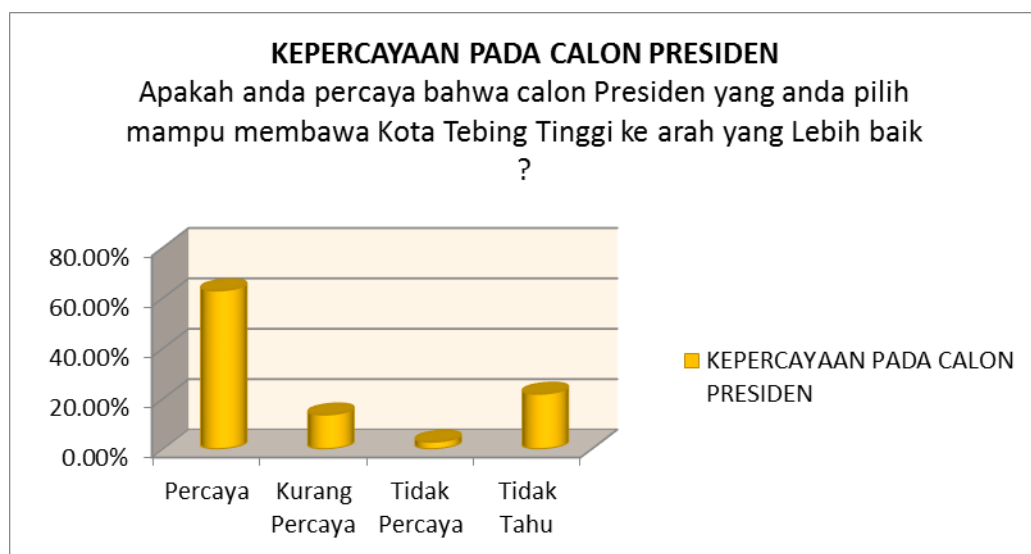
Grafik 4.2.10. Tingkat Kepercayaan Masyarakat kepada Caleg yang Akan Dipilih



Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan yang sangat tinggi dari masyarakat kepada calon anggota legislative yang akan dipilih harus disahuti dan diwujudkan. Para calon anggota wakil rakyat tentunya tidak ingin mencederai kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat karena kalau kepercayaan yang diberikan itu tidak dilaksanakan akan menjadikan penghambat kepada wakil rakyat pada pemilu berikutnya untuk mencalonkan menjadi wakil rakyat berikutnya. Untuk itu kepercayaan yang diberikan harus benar-benar dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya dengan pertanyaan yang sama untuk pemilihan calon presiden 2014 dapat dilihat pada grafik 4.2.11 berikut.

Grafik 4.2.11. Tingkat Kepercayaan Masyarakat kepada Calon Presiden yang Akan Dipilih



Berdasarkan grafik 4.2.11 di atas ternyata masyarakat masih menaruh kepercayaan yang tinggi bahwa calon presiden terpilih akan mampu membawa Negara Indonesia, khususnya Kota Tebing Tinggi kearah yang lebih baik sebesar 62.95%, Kurang percaya 13.67 %, Tidak percaya 2.88% dan yang tidak tahu sebesar 21.94%.

Selanjutnya jika dilihat kemampuan calon presiden yang akan dipilih dalam mengatasi masalah Negara yang timbul dapat dilihat pada grafik 4.2.12 berikut.

Grafik 4.2.12. Kepercayaan Masyarakat Kepada Calon Presiden Mengatasi Masalah Negara Yang Timbul



Berdasarkan grafik 4.2.12 di atas ternyata masyarakat masih menaruh kepercayaan yang tinggi bahwa calon presiden terpilih akan mampu mengatasi masalah Negara yang timbul sebesar 62.23%, Kurang mampu 11.15 %, Tidak mampu 1.08% dan yang tidak tahu sebesar 26.26%.

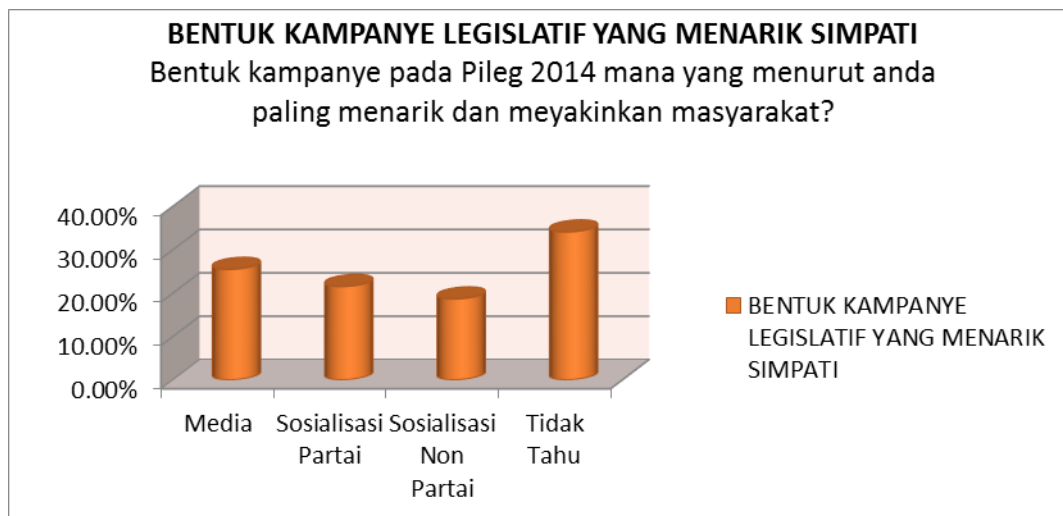
Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan yang sangat tinggi dari masyarakat kepada calon presiden yang akan dipilih harus disahuti dan diwujudkan. Calon Presiden yang terpilih tentunya tidak ingin mencederai kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat karena kalau kepercayaan yang diberikan itu tidak dilaksanakan akan menjadikan penghambat kepada presiden terpilih pada pemilu berikutnya untuk

mencalonkan menjadi calon presiden berikutnya. Untuk itu kepercayaan yang diberikan harus benar-benar dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

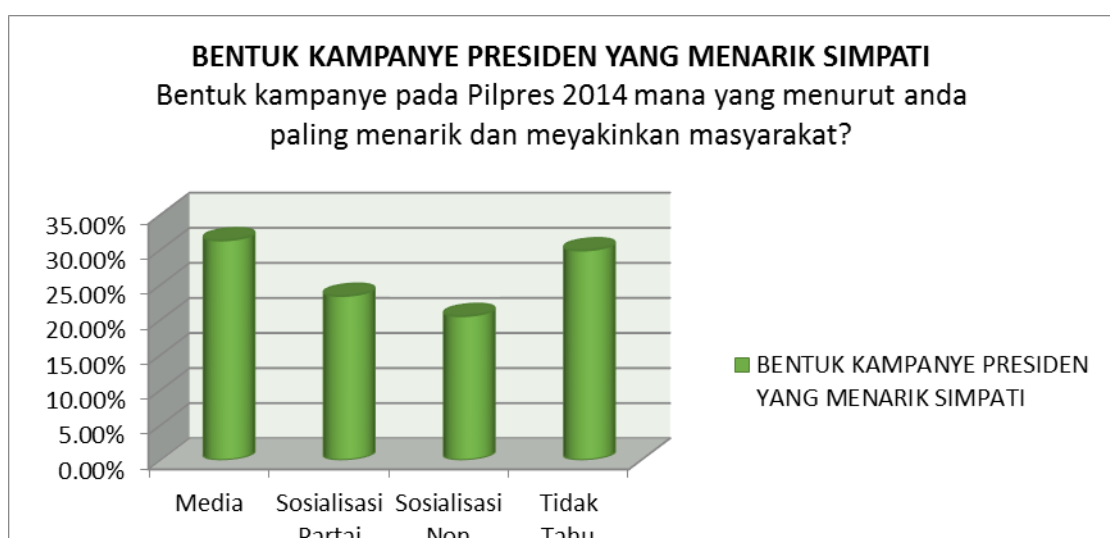
#### 4.2.8. Bentuk Kampanye

Kampanye merupakan suatu upaya untuk menarik perhatian dari masyarakat untuk memilih calon. Pada pemilu legislative yang lalu, banyak sekali model kampanye yang dilaksanakan oleh calon anggota legislative. Beberapa kampanye yang umum dilakukan dimasyarakat adalah Media juga memberikan kontribusi yang cukup besar untuk meyakinkan dan menarik perhatian pemilih 25.54% menjadi hal yang paling menarik dan meyakinkan buat masyarakat untuk memilih caleg. Selanjutnya sosialisasi partai 21.58% dan sosialisasi non partai 18.71% dan yang menjawab tidak tahu 34.17%. Hal ini menunjukkan bahwa peran media masih sangat dominan menarik perhatian dan meyakinkan masyarakat di Kota Tebing Tinggi. Hal ini dapat dilihat pada Grafik 4.2.13 berikut.

Grafik 4.2.13. Bentuk Kampanye Legislatif yang menarik perhatian dan meyakinkan pemilih



Grafik 4.2.14. Bentuk Kampanye Presiden yang menarik perhatian dan meyakinkan pemilih

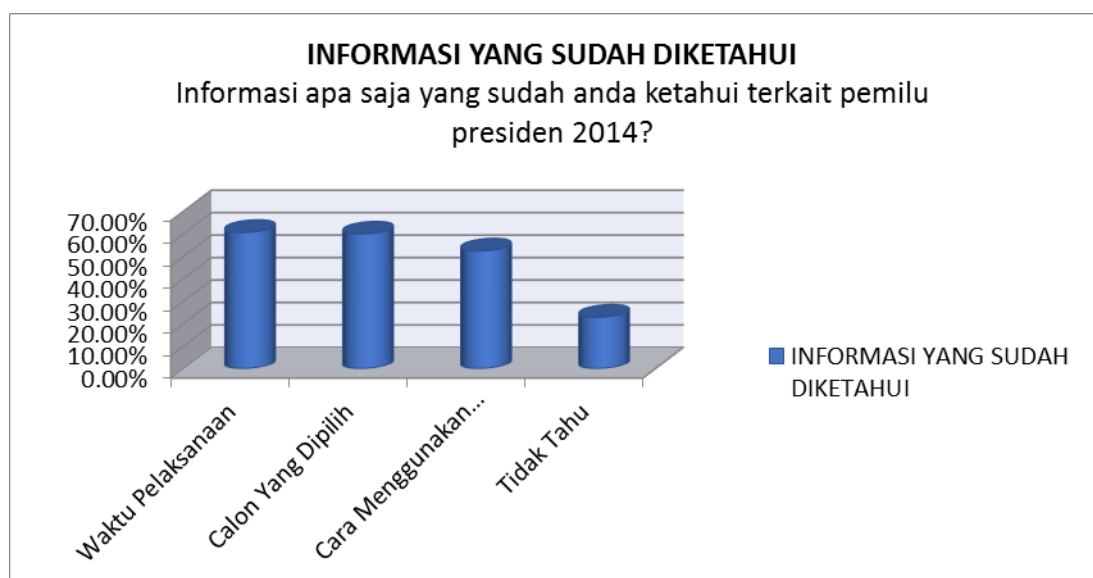


Dari grafik 4.2.14 di atas, kampanye yang umum dilakukan dimasyarakat adalah Media juga memberikan kontribusi yang cukup besar untuk meyakinkan dan menarik perhatian pemilih 31.29% menjadi hal yang paling menarik dan meyakinkan buat masyarakat untuk memilih calon presiden. Selanjutnya sosialisasi partai 23.38% dan sosialisasi non partai 20.50% dan yang menjawab tidak tahu 29.86%. Hal ini menunjukkan bahwa peran media masih sangat dominan menarik perhatian dan meyakinkan masyarakat di Kota Tebing Tinggi.

#### 4.2.9. Informasi Pemilu

Informasi pemilu tentunya sangat berguna bagi masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya agar jangan terjadi kesalahan dan kekeliruan. Informasi yang sangat diharapkan masyarakat dapat dilihat pada Grafik 4.2.15 berikut ini

Grafik 4.2.15. Informasi Yang Sudah Diketahui Terkait Pemilu Presiden 2014

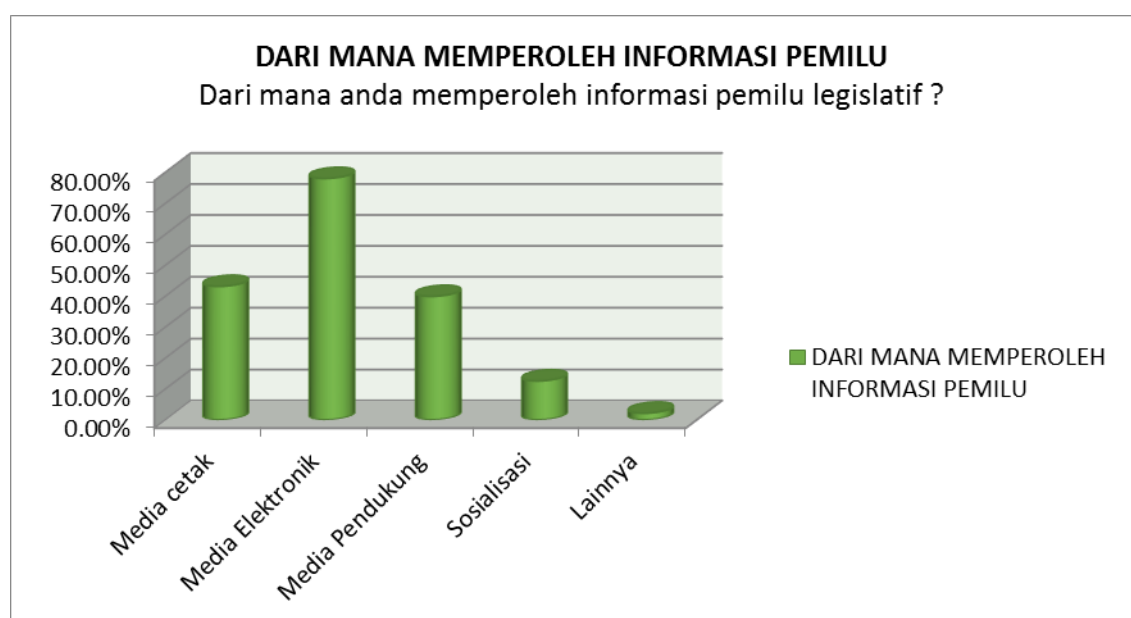


Dari Grafik 4.2.15 di atas dapat dilihat bahwa informasi yang sudah diketahui masyarakat adalah waktu pelaksanaan 60.79%, Calon yang dipilih 60.07% dan Cara menggunakan hak pilih 52.52% dan yang menjawab tidak tahu 23.02%.

Dari Grafik 4.2.12 di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah mengetahui dengan baik mengenai informasi pemilu, hal ini menunjukkan kerja keras dari penyelenggara pemilu baik PPS, PPK maupun KPU Kota Tebing Tinggi dalam memberikan sosialisasi mengenai pelaksanaan pemilu sangat berhasil.

Selanjutnya perlu diketahui darimana masyarakat memperoleh informasi pemilu tersebut baik pemilu legislative maupun pemilu presiden 2014.

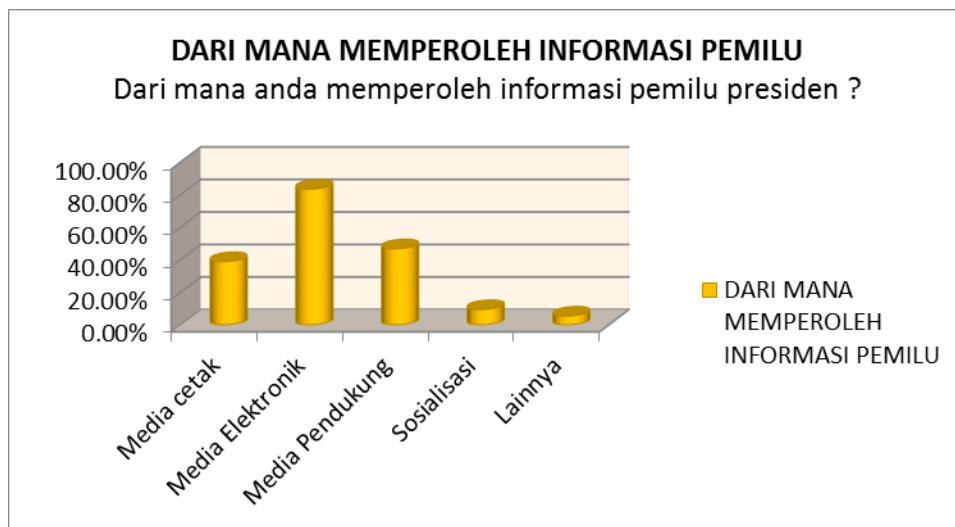
Grafik 4.2.16. Dari Mana Masyarakat Mengetahui Informasi Terkait Pemilu 2014



Dari Grafik 4.2.16 di atas dapat disimpulkan bahwa media sangat berperan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Media elektronik memberikan kontribusi yang besar memberikan informasi kepada masyarakat pada pemilu legislative 2014 sebesar 78.06%, media cetak 43.17% dan media pendukung 39.93%. Selanjutnya sosialisasi 12.59% dan lainnya 2.16 %.

Jika dibandingkan dengan pemilu Presiden 2014, media juga memberikan pengaruh yang sangat besar. Hal ini dapat dilihat pada grafik 4.2.17 berikut.

Grafik 4.2.17. Dari Mana Masyarakat Mengetahui Informasi Terkait Pemilu 2014



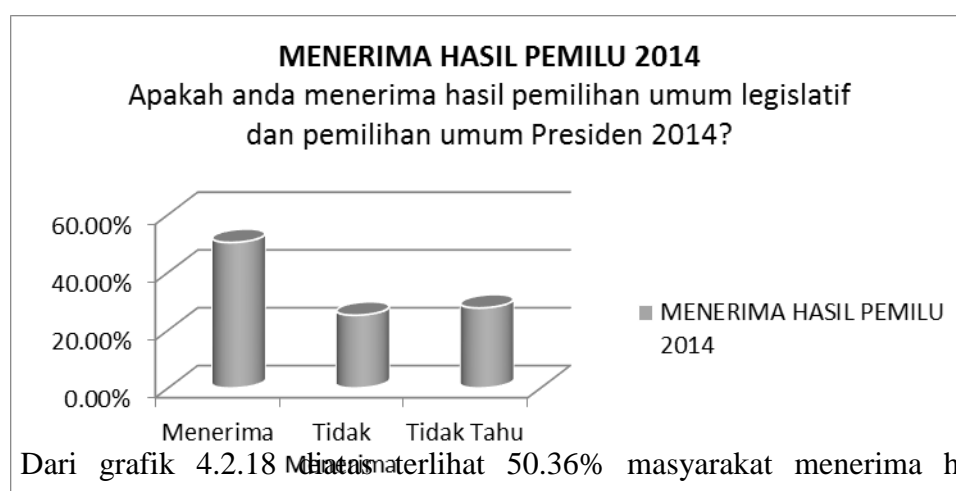
Dari Grafik 4.2.17 di atas dapat disimpulkan bahwa media sangat berperan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Media elektronik memberikan kontribusi yang besar memberikan informasi kepada masyarakat pada pemilu legislative 2014 sebesar 83.81%, media pendukung 47.12% dan media cetak 39.20%. Selanjutnya sosialisasi 9.71% dan lainnya 5.75 %.

#### 4.2.10. Penerimaan Hasil Pemilu

Kesimpulan akhir dari penyelenggaraan pemilu adalah apakah masyarakat dapat menerima atau tidak menerima hasil dari penyelenggaraan pemilu itu. Pada pemilu 2014 di Kota Tebing Tinggi baik pemilu legislative 2014 maupun pemilu presiden 2014 dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada grafik 4.2.18 berikut.



Grafik 4.2.18. Penerimaan Masyarakat Terhadap Hasil Pemilu



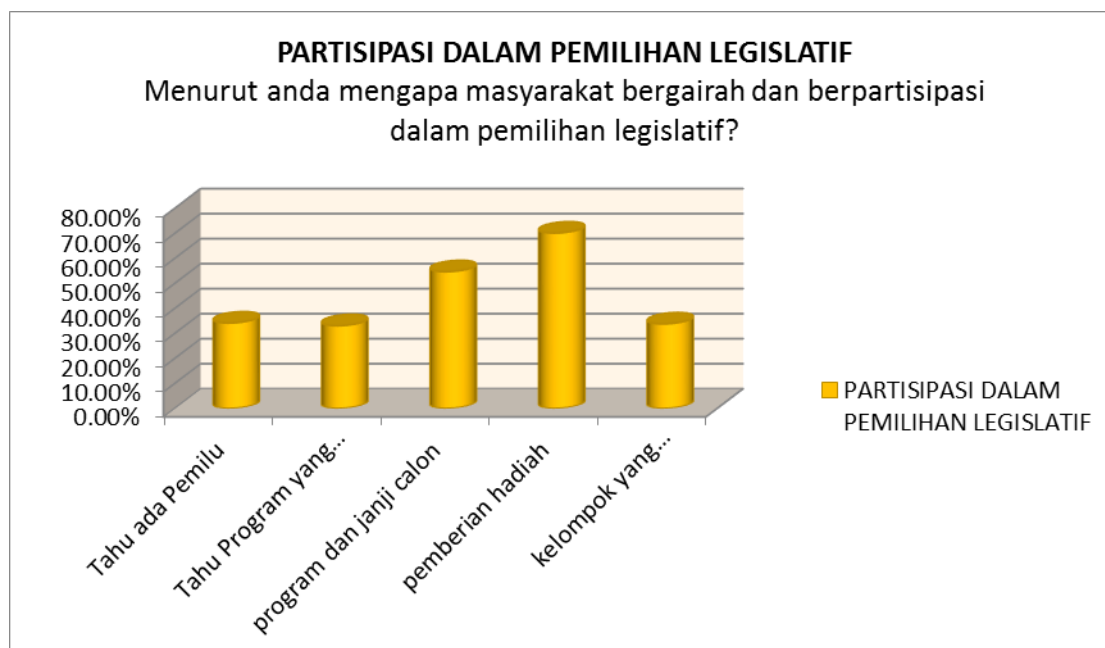
legislative dan presiden 2014. Hal membuktikan bahwa kerja keras yang telah dilakukan oleh KPU Kota Tebing Tinggi mulai dari perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pemilu tahun 2014 benar-benar diapresiasi masyarakat. Sementara yang tidak menerima hasil pemilu 25.18% dan yang menjawab tidak tahu 27.69%.

#### 4.2.11. Partisipasi Pemilih

Partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan pemilihan umum. Semakin banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya, maka semakin berhasil penyelenggaraan pemilu dan sebaliknya semakin sedikit pemilih yang menggunakan hak pilihnya maka pelaksanaan pemilu itu sendiri menjadi kurang berhasil. Walaupun penggunaan hak memilih menjadi hak dari pemilih itu sendiri, tetapi sebagai penyelenggara tentunya berkewajiban memotivasi dan mengajak agar masyarakat menggunakan hak pilihnya.

Dari grafik 4.2.19 berikut dapat dilihat kenapa masyarakat berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya pada penyelenggaraan pemilu.

Grafik 4.2.19. Gairah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Legislatif 2014



Dari Grafik 4.2.19 berikut dapat disimpulkan bahwa 70.14% masyarakat bergairah dan berpartisipasi dalam pemilihan legislative karena ada yang memberikan hadiah , program dan janji calon yang akan dipilih 54.68%, Tahu kalau ada pemilihan umum 34.17%, adanya ajakan dari kelompok tertentu untuk memilih 33.81%, mengetahui dengan jelas program kerja yang ditawarkan calon 33.09%.

Jika dibandingkan dengan pemilu presiden 2014 yang jumlah pemilihnya semakin menurun, dapat dilihat dari grafik 4.2.20 berikut.

Grafik 4.2.20. Partisipasi Dalam memilih Presiden Cenderung Menurun



Dari grafik 4.2.20 di atas dapat dilihat menurut pendapat masyarakat, partisipasi dalam memilih presiden pada pemilu presiden 2014 cenderung menurun disebabkan karena masyarakat sudah kurang percaya dengan calon yang akan dipilih sebesar 53.96%, tidak ada calon yang memberikan hadiah 49.28%, adanya wacana golput sebesar 37.05%, tidak

mengetahui dengan jelas program kerja yang ditawarkan calon 36.33%, bosan mengikuti pemilu yang terlalu sering 30.58% dan tidak tahu kalau ada pemilihan umum 17.99%.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Dari uraian yang telah dipaparkan dari hasil angket yang disebarakan kepada sampel yang ada di Kota Tebing Tinggi tentang kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS (Voter turn-out) dimana partisipasi pemilih sejak pemilu 1999 sampai dengan pemilu 2014 bergerak fluktuatif. Pada pemilu legislatif, penurunan partisipasi pemilih sekitar 10% konsisten terjadi sampai pada pemilu 2009. Sementara itu pada pemilu 2014, angka partisipasinya naik sebesar 5%. Pada kasus pilpres, tercatat dalam pemilu 2014 pertama kalinya dalam sejarah angka partisipasinya lebih rendah dibandingkan pemilu legislatif. Pertanyaannya, kenapa angka partisipasi pemilu legislatif naik dibandingkan pemilu sebelumnya? Kenapa angka partisipasi Pilpres menyimpang dari pola pada pemilu-pemilu sebelumnya? Selain itu kenapa golput tetap saja hadir dalam setiap pemilu ? Apa penyebabnya? dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Pemilih di dominasi tamatan Sekolah Menengah Umum 40.29%, Sarjana 19.06%, Sekolah Menengah Pertama 15.74%, Diploma 13.67%. Sedangkan tamatan Sekolah Dasar 11.51%. Hal ini menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat sudah sangat memadai sehingga pola berfikirnya juga sudah sangat baik.
2. Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan pemilu Presiden 2014 Kota Tebing Tinggi telah mencerminkan nilai demokrasi yang diharapkan sebanyak 48.56% jawaban dari responden. Sedangkan yang mengatakan pelaksanaan tidak demokrasi sebanyak 12.95% responden, 37.41% responden menjawab tidak tahu.
3. Kesadaran masyarakat Kota Tebing Tinggi menggunakan hak pilih pada pemilihan umum Legislatif 2014 cukup tinggi 71.68%.
4. Yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya dalam memilih calon anggota legislatif adalah karena sadar akan haknya sebagai warga Negara 41.73%, ajakan dari keluarga 28.42% dan karena ada imbalan 19.42%.

sedangkan pada pilpres karena sadar akan haknya sebagai warga Negara 50%, ajakan dari keluarga 24.82% dan karena ada imbalan 25.18%.

5. Hal pemberian hadiah ini dapat dilihat bahwa 36.65% masyarakat mengatakan pemberian hadiah kepada pemilih adalah hal yang biasa saja, 36.33% menyatakan setuju. Hanya 15.83% yang menyatakan kurang setuju dan 15.83% yang menyatakan tidak setuju.
6. Sebanyak 85.61% masyarakat belum atau tidak melihat Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditempelkan oleh penyelenggara pemilu dan hanya 14.39% yang melihat. Dari hasil tersebut dapat dikatakan kesadaran masyarakat untuk mengecek identitasnya di Daftar Pemilih tetap pemilu sangat rendah sekali, hal ini menjadi catatan penting buat penyelenggara pemilu di Kota Tebing Tinggi baik PPS, PPK maupun KPU Kabupaten dan juga masyarakat untuk terus saling mengingatkan tentang pentingnya DPT, sehingga kalau belum terdaftar di DPT dapat dengan segera didaftarkan. Karena salah satu syarat untuk bisa menggunakan hak pilih adalah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT).
7. Informasi yang sudah diketahui masyarakat tentang pemilu adalah waktu pelaksanaan 60.79%, Calon yang dipilih 60.07% dan Cara menggunakan hak pilih 52.52% dan yang menjawab tidak tahu 23.02%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah mengetahui dengan baik mengenai informasi pemilu, hal ini menunjukkan kerja keras dari penyelenggara pemilu baik PPS, PPK maupun KPU Kota Tebing Tinggi dalam memberikan sosialisasi mengenai pelaksanaan pemilu sangat berhasil.
8. Masyarakat menerima hasil pemilu legislative dan presiden 2014 sebesar 50.36%. Hal membuktikan bahwa kerja keras yang telah dilakukan oleh KPU Kota Tebing Tinggi mulai dari perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pemilu tahun 2014 benar-benar diapresiasi masyarakat. Sementara yang tidak menerima hasil pemilu 25.18% dan yang menjawab tidak tahu 27.69%.

9. Pada pemilu legislatif 70.14% masyarakat bergairah dan berpartisipasi dalam pemilihan legislatif karena ada yang memberikan hadiah, program dan janji calon yang akan dipilih 54.68%, Tahu kalau ada pemilihan umum 34.17%, adanya ajakan dari kelompok tertentu untuk memilih 33.81%, mengetahui dengan jelas program kerja yang ditawarkan calon 33.09%. Sedangkan pada pemilu presiden 2014 cenderung menurun disebabkan karena masyarakat sudah kurang percaya dengan calon yang akan dipilih sebesar 53.96%, tidak ada calon yang memberikan hadiah 49.28%, adanya wacana golput sebesar 37.05%, tidak mengetahui dengan jelas program kerja yang ditawarkan calon 36.33%, bosan mengikuti pemilu yang terlalu sering 30.58% dan tidak tahu kalau ada pemilihan umum 17.99%.

## **5.2. Saran-Saran**

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, maka saran-saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemilihan umum Legislatif 2014 di Kota Tebing Tinggi masih perlu mendapat perhatian dari penyelenggara pemilu baik di tingkat KPPS, PPS, PPK dan KPU Kota Tebing Tinggi.
2. Pelaksanaan pemilu perlu lebih demokrasi lagi, untuk itu diharapkan penyelenggara pemilu lebih professional lagi untuk hasil yang lebih demokratis pada pemilu berikutnya.
3. Minat masyarakat mengikuti pemilu masih kecil, hal ini menjadi suatu hal yang menjadi catatan buat penyelenggara pemilu untuk terus mengadakan sosialisasi dan memotivasi masyarakat agar semakin berminat mengikuti pemilu.
4. Pendidikan politik kepada masyarakat sangat perlu untuk ditingkatkan, dengan semakin baiknya pendidikan politik di tingkat masyarakat akan menghasilkan pemilu yang lebih berkualitas dan kesadaran akan pentingnya demokrasi.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Dari uraian yang telah dipaparkan dari hasil angket yang disebarkan kepada sampel yang ada di Kota Tebing Tinggi tentang kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS (Voter turn-out) dimana partisipasi pemilih sejak pemilu 1999 sampai dengan pemilu 2014 bergerak fluktuatif. Pada pemilu legislatif, penurunan partisipasi pemilih sekitar 10% konsisten terjadi sampai pada pemilu 2009. Sementara itu pada pemilu 2014, angka partisipasinya naik sebesar 5%. Pada kasus pilpres, tercatat dalam pemilu 2014 pertama kalinya dalam sejarah angka partisipasinya lebih rendah dibandingkan pemilu legislatif. Pertanyaannya, kenapa angka partisipasi pemilu legislatif naik dibandingkan pemilu sebelumnya? Kenapa angka partisipasi Pilpres menyimpang dari pola pada pemilu-pemilu sebelumnya? Selain itu kenapa golput tetap saja hadir dalam setiap pemilu ? Apa penyebabnya? dapat diambil beberapa kesimpulan:

10. Pemilih di dominasi tamatan Sekolah Menengah Umum 40.29%, Sarjana 19.06%, Sekolah Menengah Pertama 15.74%, Diploma 13.67%. Sedangkan tamatan Sekolah Dasar 11.51%. Hal ini menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat sudah sangat memadai sehingga pola berfikirnya juga sudah sangat baik.
11. Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan pemilu Presiden 2014 Kota Tebing Tinggi telah mencerminkan nilai demokrasi yang diharapkan sebanyak 48.56% jawaban dari responden. Sedangkan yang mengatakan pelaksanaan tidak demokrasi sebanyak 12.95% responden, 37.41% responden menjawab tidak tahu.
12. Kesadaran masyarakat Kota Tebing Tinggi menggunakan hak pilih pada pemilihan umum Legislatif 2014 cukup tinggi 71.68%.
13. Yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya dalam memilih calon anggota legislatif adalah karena sadar akan haknya sebagai warga Negara 41.73%, ajakan dari keluarga 28.42% dan karena ada imbalan 19.42%.

sedangkan pada pilpres karena sadar akan haknya sebagai warga Negara 50%, ajakan dari keluarga 24.82% dan karena ada imbalan 25.18%.

14. Hal pemberian hadiah ini dapat dilihat bahwa 36.65% masyarakat mengatakan pemberian hadiah kepada pemilih adalah hal yang biasa saja, 36.33% menyatakan setuju. Hanya 15.83% yang menyatakan kurang setuju dan 15.83% yang menyatakan tidak setuju.
15. Sebanyak 85.61% masyarakat belum atau tidak melihat Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditempelkan oleh penyelenggara pemilu dan hanya 14.39% yang melihat. Dari hasil tersebut dapat dikatakan kesadaran masyarakat untuk mengecek identitasnya di Daftar Pemilih tetap pemilu sangat rendah sekali, hal ini menjadi catatan penting buat penyelenggara pemilu di Kota Tebing Tinggi baik PPS, PPK maupun KPU Kabupaten dan juga masyarakat untuk terus saling mengingatkan tentang pentingnya DPT, sehingga kalau belum terdaftar di DPT dapat dengan segera didaftarkan. Karena salah satu syarat untuk bisa menggunakan hak pilih adalah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT).
16. Informasi yang sudah diketahui masyarakat tentang pemilu adalah waktu pelaksanaan 60.79%, Calon yang dipilih 60.07% dan Cara menggunakan hak pilih 52.52% dan yang menjawab tidak tahu 23.02%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah mengetahui dengan baik mengenai informasi pemilu, hal ini menunjukkan kerja keras dari penyelenggara pemilu baik PPS, PPK maupun KPU Kota Tebing Tinggi dalam memberikan sosialisasi mengenai pelaksanaan pemilu sangat berhasil.
17. Masyarakat menerima hasil pemilu legislative dan presiden 2014 sebesar 50.36%. Hal membuktikan bahwa kerja keras yang telah dilakukan oleh KPU Kota Tebing Tinggi mulai dari perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pemilu tahun 2014 benar-benar diapresiasi masyarakat. Sementara yang tidak menerima hasil pemilu 25.18% dan yang menjawab tidak tahu 27.69%.



18. Pada pemilu legislatif 70.14% masyarakat bergairah dan berpartisipasi dalam pemilihan legislatif karena ada yang memberikan hadiah, program dan janji calon yang akan dipilih 54.68%, Tahu kalau ada pemilihan umum 34.17%, adanya ajakan dari kelompok tertentu untuk memilih 33.81%, mengetahui dengan jelas program kerja yang ditawarkan calon 33.09%. Sedangkan pada pemilu presiden 2014 cenderung menurun disebabkan karena masyarakat sudah kurang percaya dengan calon yang akan dipilih sebesar 53.96%, tidak ada calon yang memberikan hadiah 49.28%, adanya wacana golput sebesar 37.05%, tidak mengetahui dengan jelas program kerja yang ditawarkan calon 36.33%, bosan mengikuti pemilu yang terlalu sering 30.58% dan tidak tahu kalau ada pemilihan umum 17.99%.

## **5.2. Saran-Saran**

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, maka saran-saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

5. Pelaksanaan pemilihan umum Legislatif 2014 di Kota Tebing Tinggi masih perlu mendapat perhatian dari penyelenggara pemilu baik di tingkat KPPS, PPS, PPK dan KPU Kota Tebing Tinggi.
6. Pelaksanaan pemilu perlu lebih demokrasi lagi, untuk itu diharapkan penyelenggara pemilu lebih professional lagi untuk hasil yang lebih demokratis pada pemilu berikutnya.
7. Minat masyarakat mengikuti pemilu masih kecil, hal ini menjadi suatu hal yang menjadi catatan buat penyelenggara pemilu untuk terus mengadakan sosialisasi dan memotivasi masyarakat agar semakin berminat mengikuti pemilu.
8. Pendidikan politik kepada masyarakat sangat perlu untuk ditingkatkan, dengan semakin baiknya pendidikan politik di tingkat masyarakat akan menghasilkan pemilu yang lebih berkualitas dan kesadaran akan pentingnya demokrasi.

